



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

# **PROSES REKRUITMEN KADER PEREMPUAN KPS DAN DEMOKRAT PADA PEMILU LEGISLATIF 2009-2014 DI KOTA BUKITTINGGI**

## **SKRIPSI**



**SILVI PERMATA SARI  
04193043**

**JURUSAN ILMU POLITIK  
FAKULTAS SOSIAL ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2011**

## ABSTRAK

**Silvi Permata Sari, 04193043, Skripsi dengan judul Proses Rekrutmen Kader Perempuan PKS dan Demokrat Pada Pemilu Legislatif 2009-2014 di Kota Bukittinggi. Sebagai pembimbing I adalah Drs. Tamrin, Msi dan pembimbing II Tengku Rika Valentina S.IP, Msi. Skripsi ini terdiri dari 6 Bab, yaitu: Pendahuluan; Landasan Teori; Metode Penelitian; Deskripsi Lokasi/Objek Penelitian; Temuan dan Analisa Data; serta Kesimpulan dan Saran.**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan tentang bagaimana proses rekrutmen kader perempuan oleh partai politik (PKS dan Demokrat) pada Pemilu Legislatif periode 2009-2014 di Kota Bukittinggi. Konsep yang digunakan adalah konsep partai politik dan rekrutmen politik.

Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Tipe penelitian yang digunakan deskriptif. Data primer diperoleh langsung dari informan yang dilakukan dengan wawancara langsung terhadap responden, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumentasi, studi kepustakaan dan data-data yang berkaitan dengan partai. Untuk menentukan informan, peneliti menggunakan teknik *Purposive sampling*. Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini maka dilakukan dengan cara triangulasi data.

Konsep yang digunakan adalah konsep dari kepemimpinan Alan Ware, untuk menjelaskan proses rekrutmen kader perempuan PKS dan Demokrat pada pemilu legislatif periode 2009-2014 di Kota Bukittinggi. Alan Ware mengemukakan lima cara dalam prosedur seleksi, dengan menggunakan kelima poin ini maka peneliti mendapatkan hasil bahwa proses rekrutmen kader perempuan PKS dan Demokrat Bukittinggi telah terlaksana dengan baik, dimana terdapat prosedur atau ketentuan dan batas seleksi yang jelas dalam proses pencalonan.

Akhirnya, pada penelitian ini menyimpulkan bahwa PKS dan Partai Demokrat pada pemilu legislatif untuk periode 2009-2014 di Kota Bukittinggi telah menggunakan aturan dan prosedur yang jelas serta adanya keterbukaan dalam proses rekrutmennya.

Kata kunci : proses rekrutmen, kader perempuan, PKS dan Demokrat

## ABSTRACT

**Silvi Permata Sari, 04193043, a research about “ Recruitment Proses PKS and the Democratic cadre Women's Legislative Elections In 2009-2014 in Bukittinggi”. The instructors are Drs. Tamrin, Msi and Tengku Rika Valentina S. IP, Msi. This reseach contain of 6 chapters: Introduction; foundation of Theory: Methods of Research; Description of place and object of research; Findings and Data,s Analize; and Conclusions and Recommendations.**

The aim of this reseach to explain and describe how the process of women recruitment by cadres of political parties (PKS and Democrats) in the legislative election in Bukittinggi period 2009-2014. The main theory in this research is about political parties, political recruitment.

This reseach used the qualitative method. It is kind of descriptive research. The primery datas are collected by direct interview with respondents , the secondary data collected from the documentation, library research and data relating to party. To determine the informants in this reseach, researchers used a purposive sampling technique. To test the validity of the data in this reseach is done by triangulation of data.

This reseach use the concept of leadership selection by Alan Ware, researchers describe the process of recruitment of women cadres in PKS and the Democrat legislative elections in the 2009-2014 period in Bukittinggi. Alan Ware suggests five ways in selection procedures, using all five points are then researchers have found that the process of recruitment of women cadres Bukittinggi PKS and Democrats have done well, where there are procedures or rules and boundaries clear selection in the nomination process.

Finally, in this study conclusion that PKS and the Democrat Party in legislative elections for the 2009-2014 period in Bukittinggi has used clear and openness rules in recruitment process of women cadres.

Key words: recruitment process, women cadres , PKS and Democrats



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR BAGAN.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	14
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Manfaat Penelitian.....	16
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>17</b>
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	17
B. Tinjauan Teori .....	19
1. Partai Politik.....	20
2. Rekrutmen Politik .....	25
C. Kerangka Pemikiran.....	36



<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>37</b>
A. Pendekatan dan Desain Penelitian.....	37
B. Lokasi Penelitian .....	38
C. Peranan Peneliti.....	38
D. Unit Analisis.....	39
E. Teknik Pengambilan Informan.....	39
F. Teknik Pengumpulan Data .....	42
1. Teknik Wawancara.....	42
2. Dokumentasi.....	43
G. Uji Keabsahan Data.....	43
H. Analisis Data .....	44
 <b>BAB IV DESKRIPSI LOKASI DAN OBJEK PENELITIAN.....</b>	 <b>45</b>
A. Gambaran umum tentang Objek penelitian (Partai Demokrat dan PKS) .....	46
1. Sejarah Pembentukan dan Berdirinya Partai Demokrat.....	46
2. Pengesahan Partai Demokrat.....	49
3. Visi, Misi dan Tujuan Partai Demokrat .....	51
B. Sejarah Pembentukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).....	53
1. Visi Partai Keadilan Sejahtera.....	56
2. Misi Partai Keadilan Sejahtera .....	56

C. Gambaran Pemilu Legislatif Periode 2009/2014 Di Kota Bukittinggi.....	57
--	----

**BAB V PROSES REKRUITMEN KADER PEREMPUAN PKS DAN DEMOKRAT PADA PEMILU LEGISLATIF 2009-2014 DI KOTA BUKITTINGGI ..... 59**

A. Proses Rekrutmen Caleg Perempuan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Demokrat pada Pemilu Legislatif Periode 2009-2014 kota Bukittinggi. ....	61
1. Proses Rekrutmen Caleg Perempuan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Pemilu Legislatif Periode 2009-2014 di Kota Bukittinggi .....	63
a. Prosedur dan Ketentuan dalam Proses Penyeleksian PKS .....	63
b. Batas Seleksi Dalam Proses Penyeleksian PKS .....	64
c. Kekuasaan unit pengambilan keputusan PKS.....	68
d. Urutan Posisi Kandidat PKS Dalam Proses Penyeleksian .....	71
e. Kemudahan Kandidat PKS yang Telah Diseleksi ke Dalam Jabatan Publik .....	77
2. Proses Rekrutmen Caleg Perempuan oleh Partai Demokrat pada Pemilu Legislatif Periode 2009-2014 di kota Bukittinggi.....	79
a. Prosedur dan Ketentuan dalam Proses Penyeleksian Demokrat .....	79

b. Batas Seleksi Dalam Proses Penyeleksian Demokrat.....	81
c. Kekuasaan unit pengambilan keputusan Demokrat.....	85
d. Urutan Posisi Kandidat Demokrat Dalam Proses Penyeleksian	86
e. Kemudahan Kandidat Demokrat yang Telah Diseleksi ke dalam Jabatan Publik .....	90
3. Kendala Bagi Caleg Perempuan Pada Pemilu Legislatif Periode 2009-2014 di kota Bukittinggi .....	92

## **BAB VI PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	96
B. Saran .....	97

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>99</b>
-----------------------------	-----------



## DAFTAR TABEL

### TABEL

1. Partai Dan Nomor Urut Caleg Pada Pemilu Legislatif 2009-2014	
Kota Bukittinggi ( Daerah Pemilihan I) .....	6
2. Partai Dan Nomor Urut Caleg Pada Pemilu Legislatif 2009-2014	
Kota Bukittinggi (Daerah Pemilihan II) .....	8
3. Nama-Nama Anggota Calon Legislatif Terpilih Pada Pemilu	
Tahun 2009-2014 Kota Bukittinggi .....	9
4. Peta Keterwakilan Perempuan pada 5 Partai Politik di Lembaga Legislatif	
(DPRD Kota Bukittinggi) .....	11

## DAFTAR GAMBAR

### GAMBAR

1. Skema Rekrutmen .....	31
2. Sistem Pemilihan Tertutup .....	32
3. Sistem Pemilihan Terbuka .....	33
4. Sistem Pemilihan .....	34



**DAFTAR BAGAN**

**BAGAN**

1. Proses Rekrutmen PKS.....77

2. Proses Rekrutmen Demokrat .....90





## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Matrik Wawancara Dengan Informan
- Lampiran 3 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 4 Surat Izin Penelitian KESBANG POL DAN LINMAS  
Pemerintah Kota Bukittinggi
- Lampiran 5 SK Pembimbing, SK Ujian Proposal, SK Ujian Skripsi
- Lampiran 6 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PKS
- Lampiran 7 SK DPC Partai Demokrat Kota Bukittinggi
- Lampiran 8 Kriteria Seleksi Penomeran Caleg Partai Demokrat Kota  
Bukittinggi
- Lampiran 9 Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD, Provinsi dan DPRD  
Kabupaten/Kota
- Lampiran 10 Nama-Nama Partai Politik yang mencalonkan pada Daerah  
Pemilihan Bukittinggi I
- Lampiran 11 Nama-Nama Partai Politik yang mencalonkan pada Daerah  
Pemilihan Bukittinggi II
- Lampiran 12 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suaran Partai Dan  
Calon Anggota DPRD Daerah Pemilihan I Kota Bukittinggi Pada  
Pemilihan Umum Tahun 2009

- Lampiran 13 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suaran Partai Dan Calon Anggota DPRD Daerah Pemilihan II Kota Bukittinggi Pada Pemilihan Umum Tahun 2009
- Lampiran 14 Daftar Perolehan Suara, Kursi Dan Jumlah Calon Yang Diajukan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Serta Nama-Nama Anggota Terpilih Anggota DPRD Dalam Pemilihan Umum Tahun 2004 Kota Bukittinggi
- Lampiran 15 Daftar Perolehan Suara, Kursi Dan Jumlah Calon Yang Diajukan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Serta Nama-Nama Anggota Terpilih Anggota DPRD Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 Kota Bukittinggi
- Lampiran 16 Daftar Perolehan Suara, Kursi Dan Jumlah Calon Yang Terpilih Anggota DPRD Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 Kota Bukittinggi

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, dimana dalam menyelenggarakan pemerintahan Indonesia memakai sistem demokrasi, yaitu kedaulatan berada ditangan rakyat atau kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat. Gambaran demokratisasi tercantum dalam Pancasila yaitu sila keempat yang berbunyi: kerakyatan yang dipimpin hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Salah satu prinsip umum dari demokrasi adalah adanya pemilihan umum yang bebas, yaitu untuk memilih pemimpin pemerintahan yang dikehendaki oleh rakyat, atau anggota-anggota lembaga-lembaga perwakilan yang akan mewakili suara rakyat, maka perlu senantiasa adanya pemilihan umum yang bebas dan tidak dipengaruhi<sup>1</sup>.

Sebuah pemerintahan juga tidak bisa dianggap demokratis jika para pejabat yang memimpin pemerintahan tidak dipilih secara bebas oleh warga negara dengan cara terbuka dan jujur. Maka sebagai wadah demokrasi pemilihan umum adalah penghubung pilihan warga ke dalam kursi lembaga perwakilan dan sebagai wujud penyampaian kedaulatan rakyat kepada wakilnya.

---

<sup>1</sup> Inu Kencana Syafie, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, PT Eresco, Jakarta, 1992, hal 86.



Pemilihan umum bertujuan untuk memberikan kesempatan pada masyarakat untuk menentukan siapa yang akan mewakili mereka dalam lembaga legislatif. Dalam pemilihan umum akan dijangkau orang-orang yang benar-benar bisa dan mampu untuk masuk kedalam jabatan pemerintahan, baik itu di tingkat daerah maupun di tingkat nasional. Maka untuk menjangkau wakil-wakil rakyat yang berkualitas untuk ikut dalam pemilihan umum, tugas utama diserahkan kepada partai politik karena tujuan dibentuknya partai pada adalah untuk menciptakan saluran aspirasi yang tertib dan teratur. Dengan adanya partai politik, maka kehendak masyarakat tersalurkan dan sampai pada sasarannya.

Partai politik menjadi suatu wadah penting dalam pemilu, partai politik merupakan sebuah organisasi yang terorganisir yang anggota-anggotanya memiliki orientasi nilai-nilai dan cita-cita yang sama, tujuannya untuk mendapatkan kekuasaan serta kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan mereka<sup>2</sup>.

Sebagai sebuah unit politik, partai politik merupakan organisasi kekuasaan yang dapat membela dan memperjuangkan hak-hak dan kepentingan rakyat, tanpa harus memandang perbedaan status dan gender. Melalui mekanisme ini pulalah rakyat dapat menilai partai politik mana yang

---

<sup>2</sup> Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik (edisi revisi)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hal 32.

mempresentasikan aspirasi dan kepentingan mereka, dan memutuskan untuk mendukungnya dengan memberikan suara kepada partai tersebut.

Sebagai agen demokrasi, partai politik mempunyai tugas yang tidak ringan. Partai politik menyalurkan aspirasi konstituen serta merubahnya menjadi kebijakan publik yang bertanggungjawab. Selain itu ada tugas yang tidak kalah penting yang harus diemban partai politik yang sesuai dengan salah satu fungsinya yaitu partai politik dalam proses rekrutmen politik<sup>3</sup>. Fungsi ini berkaitan dengan seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Rekrutmen politik adalah proses dimana partai mencari anggota baru dan mengajak orang yang berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik<sup>4</sup>.

Peran partai politik sebagai sarana rekrutmen politik adalah melakukan rekrutmen politik yang adil, transparan, dan demokratis. Adil yang dimaksud adalah dalam menjalankan proses rekrutmennya partai politik memberikan kesempatan yang sama untuk laki-laki dan perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum.

UU Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, dan UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik adalah landasan hukum dan pedoman dalam menyelenggarakan pemilihan umum yang

---

<sup>3</sup> Miriam Budiardjo, *Partisipasi Dan Partai Politik*, Gramedia, Jakarta, 1981, hlm.164.

<sup>4</sup> Ibid, hal 165.



mengakomodasikan serangkaian *affirmative action*<sup>5</sup> guna tercapainya keterwakilan perempuan. Yaitu dalam UU No 2 Tahun 2008 telah ditentukan secara tegas mengenai porsi keterwakilan perempuan dalam kepengurusan suatu parpol<sup>6</sup>.

Undang-Undang Pemilu Nomor 10 Tahun 2008 juga merupakan salah satu bentuk usaha pemerintah dalam menjawab tantangan dan permasalahan baru dalam hal peningkatan keterwakilan perempuan dalam penyelenggaraan pemilu 2009. Undang-undang ini memberikan dukungan bagi terlaksananya *affirmative action*. Pada tanggal 23 Desember 2008, mahkamah konstitusi melalui pembacaan putusan perkara *judicial review* Nomor 22/PUU-VI-/2008 dan 24/PUU-VI/2008 memutuskan bahwa terdapat pasal dalam Undang-undang Pemilu Nomor 10 Tahun 2008 yang bersifat inkonstitusional yaitu pasal 214 huruf a, b, c, d, e. Pasal ini dianggap bertentangan dengan materi UUD 1945<sup>7</sup>.

Menurut Mahkamah Konstitusi pembatalan pasal 214 UU Pemilu Nomor 10 Tahun 2008 ini dapat memberikan kesempatan yang sama bagi

---

<sup>5</sup> *Affirmative Action* adalah tindakan proaktif untuk menghapuskan diskriminasi yang berdasarkan jender atau ras. Konsep ini juga merujuk pada tindakan positif yang dilakukan untuk memperbaiki dampak diskriminatif terhadap kelompok-kelompok yang tidak terwakili di masa lalu. Dalam pelaksanaannya, *affirmative action* dapat dilakukan secara sukarela maupun diwajibkan (*mandatory*). *Affirmative action* juga merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan derajat keterwakilan perempuan dalam politik.

<sup>6</sup> Pasal 2 dan 20 UU No 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, disebutkan mengenai sistem keterwakilan perempuan. Sistem keterwakilan perempuan dimaksud terdapat, baik dalam kepengurusan partai di tingkat pusat maupun ditingkat propinsi dan kabupaten/kota, dengan ketentuan kuota minimal 30 persen.

<sup>7</sup> Astrid Anugrah, *Keterwakilan Perempuan Dalam Politik*, Penerbit Pancuran Alam, Jakarta, 2009, hal 62



calon legislatif perempuan dan calon legislatif laki-laki untuk tampil dalam Pemilu. Maka sejalan dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi<sup>8</sup> yang menghapuskan sistem nomor urut dengan membatalkan Pasal 214 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008. Dengan demikian, calon anggota legislatif terpilih pada Pemilu 2009 tidak lagi berdasarkan nomor urut, tetapi harus dengan meraih suara terbanyak.

Berdasarkan ketentuan di atas masyarakat mengharapkan adanya pemberian ruang gerak bagi perempuan untuk menyampaikan aspirasinya kepada wakil-wakilnya, serta membuka kesempatan secara hukum bagi perempuan untuk ikut aktif dalam pemilu. Oleh karena itu meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan merupakan sebuah tugas yang harus dilakukan oleh masing-masing partai politik. untuk merealisasikan tujuannya dalam meningkatkan keterwakilan perempuan, maka partai politik harus menjalankan fungsi rekrutmennya dengan baik.

Fungsi rekrutmen tersebut juga harus dijalankan dengan baik oleh partai- partai politik yang mengikuti pemilihan umum 2009 di kota Bukittinggi. Partai-partai politik yang telah sah dan terdaftar menjadi peserta pemilihan umum di kota Bukittinggi telah melakukan tahapan pada fungsi

---

<sup>8</sup>Keputusan MK tentang pembatalan pasal 214 UU Nomor 10 Tahun 2008. Pasal ini mengatur penentuan caleg terpilih berdasarkan suara 30% BPP, keputusan ini dikeluarkan melalui Pembacaan Putusan Perkara Yudisial Review No 22/puu-vi/2008. Pasal 214 huruf a, b, c, d, e UU No.10 Th 2008 dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Desember 2008, dengan memutuskan bahwa terdapat pasal dalam UU No.10 Th 2008 tentang pemilu yang bersifat inkonstitusional dan dianggap bertentangan dengan materi UUD 1945, dan memutuskan sistem pemenang pemilu yang awalnya dari nomor urut berubah kepada suara terbanyak.

rekrutmennya. Yaitu masing-masing partai peserta mewakilkan para calon legislatifnya untuk ikut dalam pemilu.

Pada pemilu legislatif periode 2009-2014 yang dilaksanakan di Bukittinggi diikuti oleh 43 partai peserta (terlampir). Dari 43 partai peserta ada yang mendaftarkan calon legislatifnya pada masing-masing daerah pemilihan dan ada yang tidak mendaftarkan calon legislatifnya. Keseluruhan partai yang terdaftar untuk pemilu legislatif periode 2009-2014 ini mengusung 272 orang calon legislatif (terlampir).

Pada daerah Bukittinggi terdapat dua daerah pemilihan, yaitu daerah pemilihan Bukittinggi I dan daerah Pemilihan Bukittinggi II. 272 orang calon legislatif yang diwakilkan oleh partai peserta disebar atau menjadi utusan pada daerah daerah pemilihan I dan II. Seperti yang dapat terlihat pada tabel berikut:





**Tabel 1**  
Partai Dan Nomor Urut Caleg Pada Pemilu Legislatif 2009-2014 Kota Bukittinggi  
( Daerah Pemilihan I)

No. Urut Partai	Nama Partai	No. Urut Caleg		Total Caleg
		Laki-laki	Perempuan	
1	Hanura	1,2	-	2
2	PKPB	1,2	3	3
3	PPP-I	1	2	2
4	PPRN	1	-	1
5	Gerindra	1,2,4	3	4
6	PBN	-	-	-
7	PKPI	1,3,5	2,4,6	6
8	PKS	1,2,4,6,7	3,5,8	8
9	PAN	1,2,4,5,7,8	3,6	8
10	PPIB	1	-	1
11	PK	-	1	1
12	PPD	1,3	2	3
13	PKB	1,2	3,4	4
14	PPI	1,2	3,4	4
15	PNI Marchaenisme	-	-	-
16	PDP	1	-	1
17	PKR	1	-	1
18	PMB	1,2,4,6	3,5,7	7
19	PPDI	1	-	1
20	PDK	1,2	3	3
21	Republikan	1,2,4	3	4
22	Pelopor	-	-	-
23	Golkar	1,2,4,7,8	3,5,6,9	9
24	PPP	1,2,4,5,6,8,9,10	3,7	10
25	PDS	1,3	2	3
26	PNBK-Indonesia	1,2	3	4
27	PBB	1,2,4,5	3	5
28	PDI-P	1,2,4,5	3,6	6
29	PBR	1,2	3,4,5	5
30	Patriot	-	-	-
31	Demokrat	1,2,4,6,8,10	3,5,7,9	10
32	PKDI	1	-	1
33	PIS	-	-	-
34	PKNU	-	-	-
41	Merdeka	-	-	-
42	PPNUI	-	-	-
43	PSI	1	-	1
44	PB	-	-	-
<b>JUMLAH</b>	<b>35 Partai</b>	<b>73</b>	<b>40</b>	<b>113</b>

Data Primer: KPUD Kota Bukittinggi Pemilu Tahun 2009



Tabel 1 menunjukkan pada daerah pemilihan (Dapil) I kota Bukittinggi terdapat 35 partai yang mendaftarkan calegnya untuk dikirim ke arena pemilihan umum legislatif. Total caleg untuk dapil I berjumlah 113 orang dengan caleg laki-laki sebanyak 73 orang dan perempuan sebanyak 40 orang.

**Tabel 2**  
Partai Dan Nomor Urut Caleg Pada Pemilu Legislatif 2009-2014 Kota Bukittinggi (Daerah Pemilihan II)

No. Urut Partai	Nama Partai	No. Urut Caleg		Total Caleg
		Laki-laki	Perempuan	
1	Hanura	1,2	3	3
2	PKPB	1,2,5	3,4,6	6
3	PPP-I	1,2,4	3,5	5
4	PPRN	1,4,5	2,3,6	6
5	Gerindra	1,2,4,5,6	3	6
6	PBN	-	-	-
7	PKPI	1,2,4,5,7	3,6	7
8	PKS	1,4,5,7,8,11,13,14,15,17	2,3,6,9,10,12,16	17
9	PAN	1,2,4,5,7,8,9,10	3,6	10
10	PPIB	-	-	-
11	PK	1	-	1
12	PPD	1,2,5	3,4,6	5
13	PKB	1,3,4	2	4
14	PPI	-	-	-
15	PNI	1	-	1
	Marchaenisme			
16	PDP	1,2	3	3
17	PKR	1,2	3	3
18	PMB	1,2,4	3,5	5
19	PPDI	-	-	-
20	PDK	1,2	3	3
21	Republikan	1,3	2,4	4
22	Pelopor	-	-	-
23	Golkar	2,3,5,6,8,10,11,13	1,4,9,12	14
24	PPP	1,4,5,6	2,3,7,8,9,10,11,12	12
25	PDS	2	1	2
26	PNBK-Indonesia	1	-	1
27	PBB	1,2,3,4,6,7	5	7
28	PDI-P	1,3,4,5,6	2,7	7
29	PBR	1,2	3,4,5	5
30	Patriot	-	-	-
31	Demokrat	1,2,4,5,9,10,12,13,14,15	3,6,7,8,11,16,17	17
32	PKDI	1	-	1
33	PIS	-	-	-
34	PKNU	-	-	-

41	Merdeka	-	-	-
42	PPNUI	-	-	-
43	PSI	-	1,2	2
44	PB	-	-	-
<b>JUMLAH</b>	<b>35 Partai</b>	<b>117</b>	<b>41</b>	<b>158</b>

Data Primer : KPU Kota Bukittinggi Pemilu Tahun 2009

Tabel 2 menunjukkan pada daerah pemilihan (Dapil) II kota Bukittinggi terdapat 33 partai yang mendaftarkan calegnya untuk dikirim ke arena pemilu legislatif, total caleg untuk dapil II berjumlah 158 orang dengan caleg laki-laki sebanyak 117 orang dan perempuan sebanyak 41 orang.

Partai-partai politik ini juga diharapkan dapat menjalankan fungsi rekrutmennya dengan baik dan dapat meningkatkan angka keterwakilan perempuannya dilembaga legislatif Kota Bukittinggi, namun pada Pemilu legislatif 2009 di kota Bukittinggi terjadi penurunan jumlah kursi untuk perempuan.

Dari 43 partai yang mengusung 272 orang calon legislatif yang bertarung pada pemilu legislatif 2009 di Bukittinggi, hanya 25 orang yang berhasil duduk sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Bukittinggi tahun 2009. Yaitu seperti yang terlihat pada tabel 4.



**Tabel 3**  
**Nama-Nama Anggota Calon Legislatif Terpilih Pada Pemilu Tahun 2009-2014**  
**Kota Bukittinggi**

NO.	PARTAI POLITIK	P. SUARA		TOTAL SUARA	JUMLAH CALON		TOTAL CALON	NAMA ANGGOTA TERPILIH	
		BKT I	BKT II		BKT I	BKT II		BKT I	BKT II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	P. Hati Nurani Rakyat	786	846	1.632	2	3	5	Adi Arma, BE	Drs. Alfianus Dt. Samiak, SH
2	P. Karya Peduli Bangsa	292	347	639	3	6	9		
3	P. Pengusaha & Pekerja Indonesia	80	160	240	2	5	7		
4	P. Peduli Rakyat Nasional	37	421	458	1	6	7		
5	P. Gerakan Indonesia Raya	565	896	1.461	4	6	10		Mukhsin, A.Md
6	P. Keadilan & Persatuan Indonesia	648	986	1.634	6	7	13		Pardjono, SH
7	P. Keadilan Sejahtera	1.503	3.428	4.931	8	17	25	Ibnu Azis	Darwin, S.Si.Apt.MM
									Syahrul, SH (H. Anggun)
8	P. Amanat Nasional	1.142	2.379	3.521	8	10	18	M. Ridha	Muhammad Nur Idris, SH
									Fauzan Haviz
9	P. Perjuangan Indonesia Baru	-	-	-	1	-	1		
10	P. Kedaulatan	-	-	-	1	1	2		
11	P. Persatuan Daerah	81	192	273	3	6	9		
12	P. Kebangkitan Bangsa	328	234	562	4	4	8		
13	P. Nasional Indonesia Marhaenisme	-	32	32	-	1	1		
14	P. Demokrasi Pembaruan	169	65	234	1	3	4		
15	P. Karya Perjuangan	23	159	182	1	3	4		
16	P. Matahari Bangsa	752	172	924	7	5	12		
17	P. Penegak Demokrasi Indonesia	25	-	25	1	-	1		
18	P. Demokrasi Kebangsaan	201	79	280	3	3	6		
19	P. Republika Nusantara	321	589	910	4	4	8		
20	P. Golongan Karya	1.919	2.706	4.625	9	14	23	Jusra Adek, S. Sos	Kamasril Katik Nan Kayo
									M. Syukri
21	P. Persatuan Pembangunan	1.341	2.157	3.498	10	12	22	Syahril Mukhtar	Uneva Haryanto, St. Rj. Mudo, SH
									Dewi Anggraini, SE
22	P. Damai Sejahtera	75	86	161	3	2	5		
23	P. Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	-	-	-	4	1	5		
24	P. Bulan Bintang	479	1.141	1.620	5	7	12		H. Usman Marlen
25	P. Demokrasi Indonesia Perjuangan	482	617	1.099	6	7	13		
26	P. Bintang Reformasi	425	192	617	5	5	10		
27	P. Demokrat	6.378	7.377	13.755	10	17	27	H. Marjis	Rachmat Aris, SE
								Yontrimansyah	Maderizal
								Ir. Hj. Aisyah	Dra. Hj. Hasrida KM, S. Pd



									Syarifuddin Sjas, SH
									Hj. Hursyida, A.Ma.Pd
28	P. Kasih Demokrasi Indonesia	-	-	-	1	1	2		
29	P. Sarikat Indonesia	42	28	70	1	2	3		
	<b>TOTAL</b>	<b>18.094</b>	<b>25.289</b>	<b>43.383</b>	<b>114</b>	<b>158</b>	<b>272</b>	<b>8</b>	<b>17</b>

#### DATA SEKUNDER

Daftar perolehan suara, kursi dan jumlah calon serta nama-nama anggota terpilih

#### SUMBER

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah / Pemilu Tahun 2009

KPUD Kota bukittinggi April 2008

Tabel 3 menunjukkan bahwa dari 25 orang yang berhasil duduk sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Bukittinggi tahun 2009, hanya ada 4 orang perwakilan perempuan di daerah Bukittinggi. Keterwakilan perempuan pada pemilu 2004 dan 2009 dapat dilihat dari tabel berikut :

**Tabel 4**

Peta Keterwakilan Perempuan pada 5 Partai Politik di Lembaga Legislatif (DPRD Kota Bukittinggi)

No	Partai	Tahun 2004	Tahun 2009
1.	Demokrat	-	Aisyah Hasrida Hursyida
2.	PKS	-	-
3.	PAN	Yetti Lussi Hasir Rahmi Brisma Fitri Efendi	-
4.	Golkar	Rita Munir	-
5.	PPP	-	Dewi Anggraini

Sumber: Daftar Terpilih Anggota DPRD Pemilu Tahun 2004 dan 2009 KPUD Kota Bukittinggi

Berdasarkan tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak adanya kenaikan dari keterwakilan politik perempuan di Kota Bukittinggi dari tahun 2004 ke tahun 2009, jumlah perempuan yang duduk di DPRD kota Bukittinggi pada tahun 2004 masih sama dengan tahun 2009, yaitu berjumlah 4 orang. Dengan kenaikan jumlah penduduk dari tahun ketahun yang diiringi dengan kenaikan jumlah pemilih rupanya tidak membawa pengaruh bagi keterwakilan perempuan.

Dari gambaran hasil pemilu legislatif 2009 di kota Bukittinggi ini peneliti menemukan fenomena sosial yang menjadi alasan pendorong peneliti untuk melakukan penelitian yaitu pertama keputusan MK yang mengabulkan pembatalan pasal 214 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu seharusnya dapat mendongkrak jumlah keterwakilan perempuan pada pemilu 2009, karena tidak lagi memakai nomor urut dan hanya menerapkan model penentuan calon terpilih dengan suara terbanyak

Model penentuan caleg terpilih berdasar suara terbanyak seperti dalam putusan MK ini adalah merupakan cara paling ideal karena hanya dengan cara inilah sistem proporsional murni dapat dipraktekkan secara nyata dalam sistem pemilu karena dapat membangkitkan semangat berkompetisi antar calon laki-laki dan perempuan secara sehat, sehingga caleg perempuan mempunyai kesempatan besar untuk masuk ke dalam parlemen. Namun aturan suara terbanyak rupanya tidak terbukti efektif meningkatkan representasi perempuan di DPRD Kota Bukittinggi.



Alasan yang kedua yaitu dengan dengan kenaikan jumlah penduduk dari tahun ketahun yang diiringi dengan kenaikan jumlah pemilih rupanya tidak membawa pengaruh positif bagi keterwakilan perempuan. Dimana pada pemilu 2004 total keseluruhan pemilih di Kota Bukittinggi berjumlah 65.909 suara, sedangkan pada pemilu 2009 jumlah pemilih di kota Bukittinggi meningkat menjadi 74.720 (pemilih laki-laki 36.835 dan pemilih perempuan 37.885)<sup>9</sup>. Keunggulan jumlah pemilih perempuan pun rupanya tidak memberikan pengaruh bagi keterwakilan perempuan.

Alasan ketiga yang menjadi alasan peneliti untuk melakukan penelitian yaitu, pada dua partai besar yang termasuk kedalam lima besar partai pemenang pemilu legislatif periode 2009-2014 di Kota Bukittinggi yaitu PKS dan Partai Demokrat yang mempunyai jumlah calon legislatif perempuan yang sama, jumlah calon legislatif Demokrat (Dapil 1 dan Dapil 2) berjumlah 27 orang dengan mewakilkan calon legislatif perempuan sebanyak 10 orang, kemudian PKS dengan jumlah keseluruhan caleg (Dapil 1 dan Dapil 2) sebanyak 25 orang dengan caleg perempuan sebanyak 10 orang.

Namun setelah dilaksanakannya pemilu, kedua partai ini memperoleh jumlah kursi yang sangat berbeda untuk caleg perempuannya. Hasil perolehan kursi untuk perempuan pada kedua partai tersebut tergambar jelas pada tabel peta keterwakilan perempuan di atas dimana partai Demokrat berhasil meraih

---

<sup>9</sup> Data KPUD Kota Bukittinggi 2009



3 kursi untuk perempuan tetapi untuk PKS tidak meraih satu kursi pun untuk perempuan.

Berdasarkan fenomena yang terjadi pada kedua partai ini maka peneliti berasumsi bahwa untuk mendapatkan kursi perempuan ternyata bukanlah semata-mata bisa didorong oleh tindakan afirmatif yang diakomodasikan pemerintah melalui UU yang mengatur tentang sistem keterwakilan perempuan saja atau karena peningkatan jumlah pemilih pada pemilihan umum yang berlangsung, tetapi juga dipengaruhi oleh proses rekrutmen yang dilakukan oleh partai. Maka berdasarkan fenomena ini peneliti sangat tertarik untuk melakukan sebuah penelitian tentang bagaimana proses rekrutmen kader perempuan PKS dan Demokrat pada pemilu legislatif 2009-2014 di Kota Bukittinggi?

## **B. Rumusan Masalah**

Kenyataan yang menunjukkan menurunnya keterwakilan perempuan pada pemilu 2009 di Kota Bukittinggi yang sama sekali tidak di dorong oleh ketiga hal diatas yaitu pertama pembatalan terhadap salah satu pasal dalam UU Pemilu Nomor 10 yaitu pasal 214, yang seharusnya dapat meningkatkan representasi keterwakilan perempuan, karena telah dirubahnya sistem nomor urut menjadi suara terbanyak sehingga dapat memberikan dukungan bagi keterwakilan perempuan namun menyebabkan menurunnya jumlah perempuan.

Kedua yaitu dengan kenaikan jumlah penduduk dari tahun ketahun yang diiringi dengan kenaikan jumlah pemilih perempuan pada pemilihan umum juga tidak membawa pengaruh positif bagi keterwakilan perempuan. Dan yang ketiga adalah kesamaan jumlah angka untuk calon legislatif yang diusung masing-masing partai rupanya juga tidak dapat menjamin partai tersebut memperoleh hasil yang sama untuk jumlah kursi keterwakilan perempuan.

Berdasarkan uraian dan fakta di atas, serta memperhatikan pokok-pokok permasalahan yang ada, maka peneliti ingin meneliti tentang proses rekrutmen untuk kader perempuan yang dilakukan masing-masing partai yang mengikuti pemilu legislatif di Kota Bukittinggi guna peningkatan keterwakilan perempuan. PKS dan Demokrat adalah dua partai yang menggambarkan perbedaan yang mencolok untuk perolehan jumlah kursi untuk perempuan di DPRD kota Bukittinggi sehingga kedua partai ini akan menjadi objek pada penelitian ini yaitu tentang bagaimana **"Proses Rekrutmen Kader Perempuan PKS dan Demokrat Pada Pemilu Legislatif 2009-2014 di Kota Bukittinggi"**.

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses rekrutmen kader perempuan oleh partai politik (PKS dan Demokrat) pada Pemilu Legislatif periode 2009-2014 di Kota Bukittinggi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk,

1. Secara teoritis dapat memberikan kontribusi terhadap disiplin ilmu politik, khususnya mengenai proses rekrutmen oleh partai politik.
2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi partai politik, khususnya partai pemenang dalam memperluas dukungan politik masyarakat untuk pemilu yang akan datang.





## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Ada beberapa proses penelitian yang berkaitan dengan Upaya Partai Politik dalam Meningkatkan Keterwakilan Politik Perempuan dalam pemilu, diantaranya: penelitian yang dilakukan Yuni Susilawati (2009) yang membahas keterwakilan politik perempuan di DPRD Kota Padang Periode 2009-2014 Pasca pembatalan penetapan calon terpilih berdasarkan nomor urut dalam undang-undang nomor 10 tahun 2008. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif.

Penelitian ini menggunakan konsep *Affirmative action*, sistem perwakilan politik dan keterwakilan politik perempuan, sistem pemilihan umum yang terdiri dari *single-member constituency* (satu daerah pemilihan memilih satu wakil atau disebut sistem distrik) dan *multi-member constituency* (satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil atau disebut sistem proporsional), dan partai politik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari sembilan partai pemenang pemilu legislatif tahun 2009, ada 4 partai yang tidak memenuhi ketentuan kuota perempuan dalam daftar calon sebagaimana yang diatur dalam UU Pemilu Nomor 10 Tahun 2008 pasal 53 yaitu Hanura, Gerindra, PAN, Demokrat dan partai yang konsisten menjalankan ketentuan

sebagaimana yang tercantum dalam pasal 55 UU Pemilu tahun 2009 adalah Partai Gerindra, Golkar, dan PBB. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa jumlah perempuan yang berhasil direkrut partai untuk menjadi bakal calon masih kurang memenuhi ambang batas 30%, hanya beberapa partai saja yang dapat konsisten menjalankannya<sup>10</sup>.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Rahmaida Efif (2003). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Keterwakilan Perempuan di DPRD Sumatera Barat yaitu bagaimana sistem rekrutmen yang dipraktekkan oleh 3 partai pemenang pemilu di Provinsi Sumatera Barat (Partai Golkar, PAN, PDI-P). Penelitian ini juga mengidentifikasi aspek-aspek yang menghambat perempuan dalam memperoleh peluang dan kesempatan.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa sistem rekrutmen yang dilakukan oleh ketiga partai ternyata kurang kondusif bagi peningkatan jumlah perempuan. Persoalan deskriminatif dalam proses rekrutmen parpol yang diteliti didapatkan fakta bahwa ternyata yang menyebabkan minimnya jumlah proses yang dilalui oleh calon legislatif. Ini dapat dilihat dari ketiga partai dimana keberadaan partai politik sebagai pintu gerbang seseorang menjadi anggota legislatif ternyata tidak menjadi instrumen efektif bagi peningkatan jumlah perempuan di parlemen. Peningkatan jumlah perempuan akan terwujud apabila partai telah mendayagunakan konsep

---

<sup>10</sup> Yuni Susilawati. Keterwakilan Politik Perempuan Di DPRD Kota Padang Periode 2009-2014 Pasca Pembatalan Penetapan Calon Terpilihnya Berdasarkan Nomor Urut Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. Jurusan ilmu politik Fisip Unand. 2009.



persamaan dalam memahami setiap masalah serta melibatkan perempuan tersebut dalam setiap kegiatan partai tanpa dibeda-bedakan<sup>11</sup>.

Mengacu pada penelitian di atas, maka peneliti juga tertarik untuk melakukan penelitian tentang proses rekrutmen kader perempuan PKS dan Demokrat pada pemilu Legislatif 2009-2014 di Kota Bukittinggi. Penelitian ini tidak hanya melihat kepada penurunan persentase keterwakilan perempuan tetapi juga akan mendeskripsikan bagaimana rekrutmen yang dilakukan oleh kedua partai, yang sangat berpengaruh terhadap penurunan keterwakilan perempuan. Penelitian ini dilakukan di Kota Bukittinggi, karena pada pemilihan legislatif periode 2009-2014 terjadi penurunan kuantitas keterwakilan perempuan dimana dengan kenaikan jumlah penduduk dan peningkatan jumlah pemilih perempuan sama sekali tidak memberikan pengaruh positif bagi peningkatan anggota legislatif perempuan pada lembaga legislatif Kota Bukittinggi periode 2009-2014.

## **B. Tinjauan Teori**

Untuk menerangkan dan menjelaskan permasalahan dari penelitian, maka penulis mempunyai landasan yang digunakan dalam penulisan ini, yaitu selalu berangkat dari teori atau konsep yang dapat membantu dalam menganalisa permasalahan. Ada konsep-konsep utama yang saling berkaitan dalam penelitian ini, yaitu partai politik dan rekrutmen politik.

---

<sup>11</sup> Rahmaida Efif. Keterwakilan Perempuan Di DPRD Provinsi Sumatera Barat studi tentang: Sistem Rekrutmen Politik Kasus PAN, Golkar, PDI-P Sumatera Barat. Jurusan Ilmu Politik Fisip Unand.2003.

## 1. Partai Politik

Secara umum partai politik didefinisikan sebagai kumpulan orang yang membentuk sebuah partai yang bertujuan untuk merebut kekuasaan, mempertahankan kekuasaan dengan cara yang legitimasi melalui pemilihan umum<sup>12</sup>. Menurut Sigmund Neuman dalam buku karyanya *Modern political parties* memberikan definisi tentang partai politik<sup>13</sup> adalah organisasi artikulasi yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada menguasai kekuasaan pemerintahan dan yang bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan yang berbeda-beda.

Partai politik merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi untuk menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab<sup>14</sup>. Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Partai adalah alat untuk memperoleh kekuasaan dan untuk memerintah. Dalam pengertian modern partai politik dapat diartikan sebagai

---

<sup>12</sup> K, Ramanathan. *Konsep Azas Politik*, Jakarta: ALMS Digital Enterprise, 2000. hal 167

<sup>13</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik (edisi revisi)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008. hal 404

<sup>14</sup> Sebagaimana yang Termuat dalam UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik



suatu kelompok yang mengajukan calon-calon bagi jabatan publik untuk dipilih oleh rakyat sehingga dapat mengontrol atau mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintah<sup>15</sup>.

Kegiatan seseorang dalam partai politik merupakan suatu bentuk partisipasi politik. Partisipasi politik mencakup semua kegiatan suka rela melalui mana seseorang turut serta dalam proses pemilihan pemimpin politik dan turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam pembentukan kebijaksanaan umum.<sup>16</sup> Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama, tujuannya untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik<sup>17</sup>.

Suatu organisasi dikatakan sebagai partai politik apabila memiliki ciri-ciri umum sebagai berikut<sup>18</sup> :

- a. Sangat berorientasi pada kekuasaan, akibatnya mereka selalu diurung konflik internal karena adanya perebutan kekuasaan untuk memperoleh kedudukan politik.
- b. Kekuatan massa dijadikan andalan utama untuk merebut kekuasaan dan kedudukan politik.

---

<sup>15</sup> Lihat Marx N. Hagopian, *Regimes, Movements, And Ideologies*, New York And London: Longman, 1978

<sup>16</sup> Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm. 161

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 169

<sup>18</sup> J Kristiadi, *Setuju Partai Lokal, Menolak Partai Lokal*, Kompas, 5 Agustus 2005.

- c. Membangun oligarkhi politik, baik di dalam tubuh organisasi maupun bersama.
- d. Bersifat feodalis atau sentralistis, semua keputusan organisasi pada dasarnya dilakukan oleh pimpinan pusat termasuk proses pemilihan wakil-wakil rakyat dan kepala-kepala daerah.

Dari penjelasan diatas dapat diartikan bahwa partai politik merupakan organisasi massa yang terorganisir yang di dalamnya terdapat kelompok-kelompok warga negara sebagai sebuah unit politik yang mempunyai kepentingan atau aspirasi yang ingin disampaikan melalui kebijakan – kebijakan yang dibuat oleh partai tersebut.

#### **1) Fungsi-Fungsi Partai Politik**

Terdapat beberapa fungsi partai politik dalam negara demokrasi: <sup>19</sup>

1. Sebagai sarana komonikasi politik. Menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat berkurang.
2. Sebagai sarana sosialisasi politik. Melakukan proses dimana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana ia berada. Partai harus memperoleh dukungan seluas mungkin. Proses ini dilakukan melalui ceramah-ceramah penerangan, kursus kader, kursus penataran dan lain-lain.

---

<sup>19</sup> Miriam Budiarjo, Dasar- Dasar Ilmu Politik , hlm. 163-164



3. Sebagai sarana rekrutmen politik. Mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai (*political recruitmen*). Dengan demikian partai turut memperluas partisipasi politik. Caranya melalui kontak pribadi, persuasi, dan lain-lain. Juga diusahakan untuk menarik golongan muda untuk dididik menjadi kader yang dimasa mendatang akan mengganti pimpinan lama (*selection of leadership*).
4. Sebagai sarana pengatur konflik. Partai politik berusaha mengatasi persaingan dan perbedaan pendapat dalam masyarakat bahkan konflik dalam suasana demokrasi.

Fungsi lain partai politik adalah<sup>20</sup> :

- a). Partai politik memiliki fungsi representasi artinya ekspresi dan artikulasi kepentingan di dalam dan melalui partai, dalam pengertian ini fungsi utama partai adalah memberikan sarana politik langsung kepada kepentingan yang diwakilinya.
- b). Partisipasi, sosialisasi dan mobilisasi merupakan beberapa varian dari keseluruhan fungsi esensial. Sosialisasi adalah proses dimana kumpulan norma- norma sistem politik ditransmisikan kepada masyarakat.

---

<sup>20</sup> Dr. Ichlasul Amal, Teori- teori Mutakhir Partai Politik, PT. Tiara Wacana, Yoyakarta, 1988, hal 27-30.

Mobilisasi yaitu partai politik berusaha memasukkan secara cepat sejumlah orang yang sebelumnya berada di luar sistem tersebut.

Partisipasi berdiri diantara mobilisasi dan sosialisasi ini berarti bahwa melalui partai disemua sistem, medium ekspresi kepentingan dan partisipasi dalam pemilihan pemimpin dan kebijaksanaan terbuka untuk semua pihak.

c). Fungsi persuasi adalah kegiatan partai yang dikaitkan dengan pembangunan dan pengajuan usul –usul kebijaksanaan agar memperoleh dukungan seluas mungkin bagi kegiatan-kegiatan tersebut.

d). Fungsi rekrutmen digunakan dalam pengertian yang seluas mungkin untuk menunjukkan kesungguhan dan kesiapa untuk kepemimpinan, terbuka untuk masyarakat, penampilan badan legislatif pemerintah atau fungsi-fungsi lain oleh anggota partai, dan tentu saja kompetisi yang baik dalam pemilihan.

e). Fungsi dukungan ( *supportive function*). Partai tidak hanya memobilisasi dan memerintah tetapi juga harus menciptakan kondisi-kondisi bagi kelangsungan hidupnya dan kelangsungan hidup sistem, dimana partai tersebut beroperasi. Partai harus menciptakan dukungan pada sistem tersebut.



## 2. Rekrutmen politik

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai partai politik yang menjadi pintu gerbang<sup>21</sup> bagi peningkatan representasi politik perempuan, maka pembahasan lebih lanjut berkaitan dengan bagaimana rekrutmen politik itu sendiri.

Rekrutmen adalah proses mencari anggota yang dilakukan oleh organisasi atau lembaga yang bersifat politik dan lembaga yang bersifat non politik. Usaha memperoleh anggota oleh organisasi dapat dilakukan dengan berbagai cara atau pola. Cara atau pola yang digunakan oleh organisasi atau lembaga selalu berdasarkan pada orientasi atau lembaga yang bersangkutan.

Rekrutmen politik adalah proses mencari anggota organisasi yang berbakat oleh organisasi politik/lembaga politik untuk dijadikan pengurus organisasi politik atau yang dicalonkan oleh organisasi sebagai anggota legislatif atau eksekutif baik ditingkat daerah maupun ditingkat pusat. Rekrutmen politik yang dilakukan organisasi politik/lembaga politik untuk mengembangkan organisasi politik. Dalam mengembangkan organisasi politik maka organisasi politik tersebut merekrut sejumlah anggota masyarakat yang berbakat dibidang politik untuk dijadikan anggota organisasi politik.

---

<sup>21</sup> Pippa Norris, *Handbook of Political Party*, Oxford University Press, hal 98

Rekrutmen politik merupakan seleksi dan pemilihan atau seleksi dalam pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik umumnya dan pemerintah khususnya . Sementara menurut Prof. Miriam Budiarjo menyebutkan rekrutmen politik adalah proses dimana partai mencari anggota baru dan mengajak orang yang berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik<sup>22</sup> .

Rekrutmen politik juga berhubungan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan internal, setiap partai butuh kader-kader yang berkualitas, karena dengan itu partai tersebut dapat menjadi partai yang memiliki kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri, dengan memiliki kader yang baik maka partai tidak akan sulit menentukan pemimpinnya sendiri dan mempunyai peluang untuk mengajukan calon untuk masuk ke bursa kepemimpinan nasional<sup>23</sup> .

Rekrutmen politik sebagai salah satu fungsi dari partai politik maka partai politik sangat berperan dalam proses rekrutmen politik. Partai dibentuk memang dimaksudkan untuk menjadi kendaraan yang sah untuk menyeleksi kader-kader pemimpin negara pada jenjang-jenjang dan posisi-posisi tertentu. Kader-kader itu ada yang dipilih secara langsung oleh

---

<sup>22</sup> Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 406

<sup>23</sup> Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, edisi revisi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 408



rakyat, ada pula yang dipilih melalui cara yang tidak langsung, seperti oleh Dewan Perwakilan Rakyat, ataupun melalui cara-cara yang tidak langsung lainnya.

Partai politik juga berkepentingan memperluas dan memperbanyak keanggotaannya, maka dia pun berusaha menarik sebanyak-banyaknya orang untuk bergabung menjadi anggotanya, dengan mendirikan organisasi masa yang melibatkan golongan buruh, petani, pemuda, wanita dan kesempatan untuk berpartisipasi diperluas. Rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai, sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjaring dan melatih calon-calon pemimpin. Rekrutmen politik dapat dilakukan melalui kontak pribadi, persuasi, dan lain-lain<sup>24</sup>.

Rekrutmen digunakan di dalam pengertian yang seluas mungkin untuk menunjukkan latihan (*training*) dan persiapan buat kepemimpinan, terbuka untuk masyarakat, penampilan badan legislatif pemerintah, atau fungsi-fungsi lain oleh partai, dan tentu saja kompetisi yang baik adalah di dalam pemilu<sup>25</sup>.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa rekrutmen politik adalah proses pengisian jabatan-jabatan politik pada lembaga-lembaga politik, termasuk dalam jabatan dalam birokrasi atau administrasi negara dan partai-partai politik, rekrutmen politik

---

<sup>24</sup> Ibid, hlm. 408-409

<sup>25</sup> Dr. Ichlasul Amal, Teori- teori Mutakhir Partai Politik, PT. Tiara Wacana, Yoyakarta, 1988, hal 28.

mempunyai fungsi yang sangat penting bagi suatu sistem politik, karena melalui proses ini orang-orang yang akan menjalankan sistem politik ditentukan. Rekrutmen politik pada dasarnya merupakan fungsi penyeleksian untuk jabatan dan seleksi kepemimpinan.

Rekrutmen politik partai dapat disimpulkan sebagai ajang untuk mencari dan menyeleksi keanggotaan baru untuk diikutsertakan dalam partai politik sebagai pembelajaran politik, disamping untuk melakukan regenerasi dalam partai politik tersebut maka dilakukan melalui mekanisme yang diterapkan oleh partai. Pengaruh rekrutmen politik sangat menentukan dalam regenerasi kehidupan partai. Hal itu dikarenakan partai memerlukan penyegaran keanggotaan untuk dapat bertahan dalam mempertahankan kekuasaan politiknya dimata masyarakat.

Peran partai politik sebagai sarana rekrutmen politik adalah bagaimana partai politik memiliki andil yang cukup besar dalam hal: (1) Menyiapkan kader-kader pimpinan politik; (2) Selanjutnya melakukan seleksi terhadap kader-kader yang dipersiapkan; serta (3) Perjuangan untuk penempatan kader yang berkualitas, berdedikasi, memiliki kredibilitas yang tinggi, serta mendapat dukungan dari masyarakat pada jabatan-jabatan politik yang bersifat strategis. Makin besar andil partai politik dalam memperjuangkan dan berhasil memanfaatkan posisi tawarnya untuk memenangkan perjuangan dalam ketiga hal tersebut,



merupakan indikasi bahwa peran partai politik sebagai sarana rekrutmen politik berjalan secara efektif.

Rekrutmen politik yang adil, transparan, dan demokratis pada dasarnya adalah untuk memilih orang-orang yang berkualitas dan mampu memperjuangkan nasib rakyat untuk mensejahterakan dan menjamin kenyamanan dan keamanan hidup bagi setiap warga negara. Kesalahan dalam pemilihan kader yang duduk dalam jabatan strategis bisa menjauhkan arah perjuangan dari cita-cita kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan bagi masyarakat luas.

Untuk menjelaskan bagaimana penyeleksian calon-calon pemimpin yang ada didalam rekrutmen politik maka peneliti menggunakan bentuk seleksi calon pemimpin yang dikemukakan oleh Alan Ware. Alan Ware menjelaskan bagaimana partai dalam Demokrasi Liberal pindah terhadap pengontrolan pemerintah dan sebaliknya. Dia fokus pada penyeleksian pemimpin atau menjelaskan bagaimana mereka menyeleksi berbagai jenis pemimpin. Dalam teorinya Alan Ware lebih mengarahkan seleksi terhadap calon pemimpin kepada sistem yang demokrasi <sup>26</sup>.

Seleksi calon didalam pemilihan umum adalah sebuah faktor utama yang membentuk secara alami suatu partai. Secara signifikan partai

---

<sup>26</sup> Alan Ware. *Political Parties And Party System*. Oxford: Oxford University Press , 1916, hal 259.

memiliki perbedaan dalam cara memilih calon pemimpin. Beberapa bentuk nominasi membuat banyak kemudahan dibanding yang lain untuk partai dalam merubah jenis-jenis orang yang biasanya ternominasi.<sup>27</sup> Alan Ware mengemukakan bahwa didalam melakukan rekrutmen politik pada umumnya terdapat lima cara dalam prosedur seleksi untuk calon partai yang berbeda yaitu:<sup>28</sup>

1. Apakah penyeleksian di perintah oleh aturan dan prosedur yang jelas dan dilaksanakan oleh partai politik itu sendiri atau apakah seleksi ditentukan oleh negara yang memutuskan ketentuan dan prosedur,
2. Batas seleksi terjadi di dalam satu kekuasaan partai yang terpusat ataukah didesentralisasikan kepada unit-unit lokal,
3. Kekuatan dari pada derajat kekuasaan unit pengambil keputusan di pegang oleh segolongan kecil aktor atau kah menyebar secara luas diantara para anggota dan aktifis didalam unit tersebut,
4. Urutan posisi bagi setiap kandidat diseleksi pada setiap waktunya oleh badan pembuatan keputusan yang relevan
5. Kemudahan untuk para kandidat yang telah diseleksi kedalam jabatan publik, dapatkah mereka ditarik kembali atau apakah *incumbent* masih mempunyai peluang dalam seleksi selanjutnya.

Dalam seleksi calon pemimpin yang disampaikan oleh Alan Ware menggambarkan adanya suatu kejelasan dan adanya demokrasi. Disetiap

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hal 259

<sup>28</sup> *Ibid.*, hal 260



point menjelaskan bahwa dalam penyeleksian ada suatu keterbukaan dan aturan yang jelas.

Maka dari seleksi calon pemimpin yang disampaikan oleh Alan Ware ini dapat diambil suatu kesimpulan bahwa ada 3 poin penting yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya, yaitu dapat dilihat dari skema berikut:



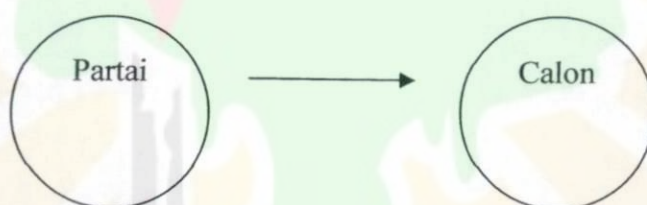
Berdasarkan skema diatas dapat dijelaskan bahwa suatu rekrutmen dikatakan telah melalui tahap yang demokrasi apabila rekrutmen tersebut menggunakan aturan yang jelas dan adanya keterbukaan dalam penyeleksian pemimpin.

Sistem rekrutmen yang dilakukan partai berbeda-beda, antara lain <sup>29</sup>:

#### 1. Sistem pemilihan tertutup

Sistem pemilihan tertutup adalah sistem rekrutmen bakal calon yang dilakukan hanya oleh pengurus partai politik dengan berbagai variasi sistem. Istilah variasi sistem merujuk pada mekanisme penentuan akhir bakal calon yang akan mengikuti pemilihan.

**Gambar 2 : Sistem Pemilihan Tertutup**



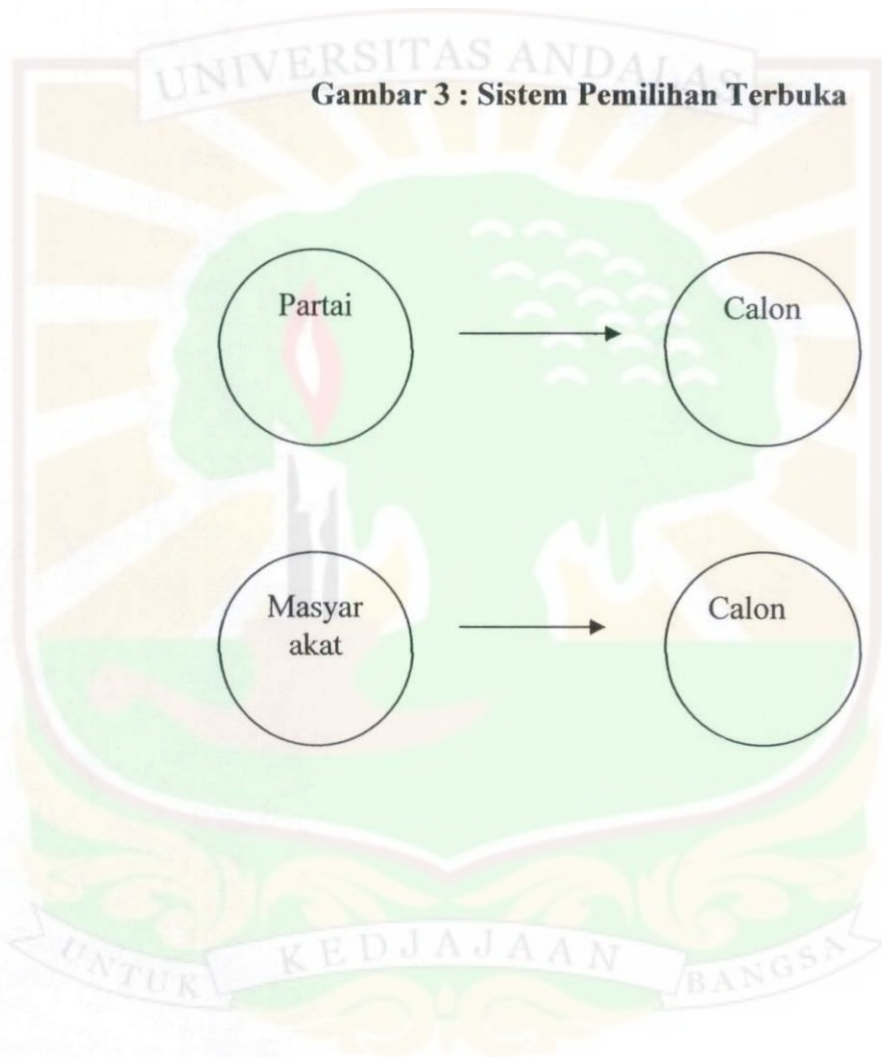
#### 2. Sistem pemilihan terbuka

Sistem pemilihan terbuka memberikan akses yang sama bagi anggota partai-partai politik dan juga anggota komunitas atau kelompok-kelompok lain dimasyarakat, seperti organisasi massa, organisasi sosial, profesional, usahawan, LSM, bintang film intelektual dan sebagainya.

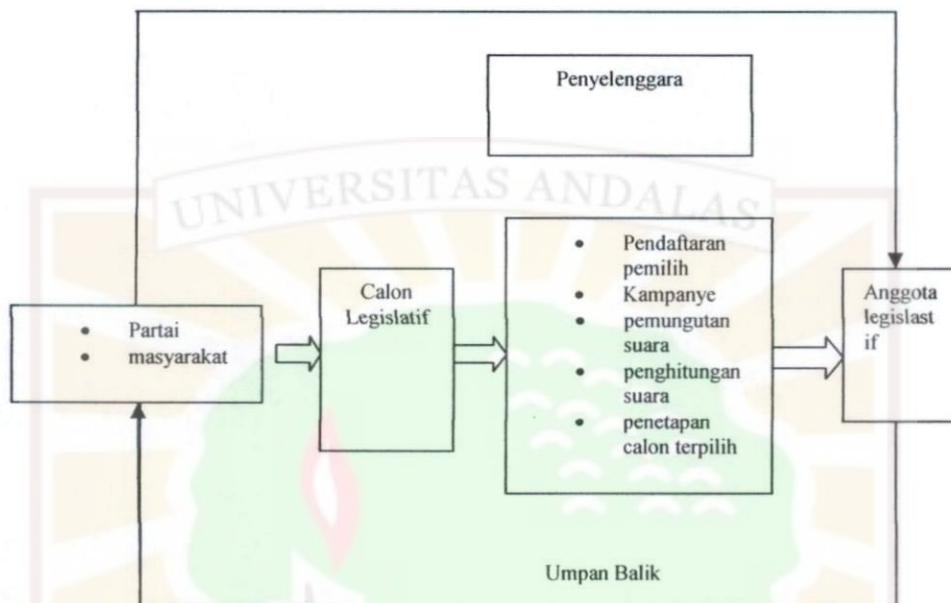
<sup>29</sup> Joko Prihatmoko, Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Semarang: Pustaka Pelajar hal 53.



Paradigma sistem pemilihan terbuka adalah bahwa sumber daya manusia berkualitas tersebar dimana-mana dan sumber kepemimpinan dapat berasal dari latar belakang apapun.



**Gambar 4 : Sistem Pemilihan**



Pada bagan diatas dapat terlihat adanya arus *in-put* mengalir bukan hanya dari partai politik saja, namun juga dari kelompok diluar partai politik. Calon legislatif berasal dari partai politik atau perseorangan diluar partai politik.

Untuk tercapainya demokrasi maka Partai politik (parpol) harus melakukan rekrutmen bakal calon (balon) secara terbuka. Hal yang sama juga tercantum dalam tata cara pemilihan kepala daerah,yaitu yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.



Berdasarkan penjelasan mengenai sistem pemilihan terbuka dan tertutup maka dapat dikelompokkan beberapa kriteria partai dikatakan melakukan rekrutmen terbuka atau tertutup. Kriteria rekrutmen terbuka yaitu<sup>30</sup>;

1. dalam proses penjaringan nama bakal calon lebih terbuka kepada umum
2. bakal calon berasal dari berbagai kalangan yang bukan merupakan kader partai
3. umumnya melaksanakan proses seleksi dengan melibatkan semua unsur partai, umumnya melalui konvensi dan lebih memperhatikan kinerja yang dimiliki oleh bakal calon yang meliputi tingkat pendidikan, pengalaman kerja atau jabatan dan pengalaman organisasi

Partai dikelompokkan kepada rekrutmen tertutup apabila memakai kriteria berikut:

1. Adanya dominasi oligarki dalam proses rekrutmen, yaitu Elite partai sangat berkuasa penuh terhadap proses rekrutmen
2. Dalam proses rekrutmen tidak dibangun relasi (*linkage*) yang baik antara partai politik dan masyarakat sipil.
3. Dalam proses rekrutmen, partai politik sering menerapkan pendekatan "*asal comor*" terhadap kandidat.

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hal 55.

4. Dalam proses rekrutmen, partai politik menerapkan patronase (lindungan).

Berdasarkan kriteria –kriteria di atas maka dalam penelitian ini peneliti juga akan menggambarkan dan menjelaskan kriteria yang dipakai partai Demokrat dan PKS dalam proses rekrutmennya.

### C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan pokok permasalahan dan kerangka teori yang telah dijelaskan di atas, maka dapat disusun kerangka analisa sebagai berikut:





## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Desain Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif menekankan pada pentingnya kedekatan dengan orang-orang dan situasi penelitian, agar peneliti memperoleh pemahaman yang jelas tentang realitas dan kondisi kehidupan nyata.

Menurut Bogdan dan Taylor pendekatan kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, pendekatan ini diarahkan pada latar belakang dan individu tersebut secara holistik (utuh)<sup>31</sup>. Pendekatan ini dipilih karena mampu menemukan fakta dan gejala sosial politik yang diamati seperti motif dan tindakan individu atau kelompok dalam realitas sosial politik yang terjadi.

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang cermat terhadap suatu fenomena sosial berdasarkan gejala-gejala. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah menggambarkan mekanisme sebuah proses<sup>32</sup> dan mendeskripsikan kondisi

---

<sup>31</sup> Lexy j Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002, hlm.3.

<sup>32</sup> Bambang Prasetyo, Lina MJ. *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.43.

yang terjadi saat penelitian tanpa pengujian hipotesa<sup>33</sup>. Data-data yang didapat di lapangan berupa data-data hasil wawancara, pengamatan (observasi) dan dokumentasi yang berisikan fakta yang didapat dari informan di lapangan tentang proses rekrutmen kader perempuan PKS dan Demokrat Pada Pemilu Legislatif 2009-2014 di Kota Bukittinggi

## **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kota Bukittinggi Sumatera Barat. Alasan pemilihan kota Bukittinggi sebagai lokasi penelitian dikarenakan adanya fenomena sosial yang menunjukkan bahwa pada pemilihan umum 2009 di Kota Bukittinggi dengan kenaikan jumlah pemilih yang drastis yang juga diungguli oleh jumlah pemilih perempuan namun terjadi penurunan keterwakilan perempuan.

## **C. Peranan Peneliti**

Penelitian kualitatif ini berhubungan dengan yang diteliti bersifat interpretatif sehingga bisa dinilai, untuk menghindari hal tersebut penilaian peneliti harus dinyatakan tegas dalam laporan penelitian, dimana hal ini memberikan manfaat dan penilaian positif. Peranan peneliti dalam penelitian

---

<sup>33</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Sebagai Suatu Pendekatan Proposal*. Bandung, Bumi Aksara, 2006, hal. 26.



ini adalah sangat dominan yaitu peran peneliti terdiri dari dua unsur yaitu sebagai instrumen penelitian dan subjek yang akan menggambarkan posisi peneliti yang akan menggambarkan proses penelitian yang akan dilakukan.

Peneliti berperan sebagai instrumen utama, setelah fokus penelitian menjadi jelas maka kemungkinan akan dikembangkan instrumen penelitian dengan melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara<sup>34</sup>.

#### **D. Unit Analisis**

Unit analisis merupakan suatu unit sosial yang digunakan oleh peneliti didalam mengukur sebuah variabel, unit analisis merupakan satuan yang akan diteliti. Didalam penelitian ini peneliti menggunakan unit analisis lembaga, yaitu lembaga partai politik yang menjadi objek utama penelitian sekaligus lembaga yang bertugas didalam menjalankan fungsi dan tugas rekrutmen politik pada pemilu legislatif periode 2009-2014 di Kota Bukittinggi.

#### **E. Teknik Pengambilan Informan**

Untuk dapat memperoleh data dalam penelitian ini maka pengumpulan data dapat dilakukan dengan menggunakan informan yaitu orang yang akan

---

<sup>34</sup> Prof. Dr. Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2005, hlm.61.

memberi informasi dan keterangan dalam penelitian<sup>35</sup>. Teknik pemilihan informan adalah *Purposive sampling* (penarikan sample secara sengaja). *Purposive sampling* digunakan apabila anggota sample dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitiannya<sup>36</sup>. Dengan kata lain informan dipilih dengan cermat sehingga relevan desain penelitian dan cukup representatif<sup>37</sup>. Jadi dalam hal ini peneliti menetapkan orang-orang yang akan dijadikan sebagai informan, sesuai dengan desain dan kriteria yang dibutuhkan.

Dalam penelitian ini peneliti memiliki dua informan yaitu informan kunci dan informan biasa. Informan kunci adalah informan yang berhubungan langsung dengan objek penelitian, Sedangkan informan biasa adalah informan pendukung didalam pencarian data.

Dalam penelitian kualitatif yang terpenting dalam prosedur sampling adalah bagaimana menentukan informan kunci (*key informan*) yang sarat informasi sesuai dengan fokus penelitian<sup>38</sup>. Adapun informan kunci didalam penelitian ini adalah pengurus partai yang terlibat didalam proses rekrutmen politik yang berasal dari partai yang sudah dipilih yaitu PKS dan Demokrat. Sedangkan informan biasa adalah orang yang berada diluar partai, akan tetapi dia mengetahui informasi-informasi tentang pola rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik terhadap perempuan maka yang informan yang diambil adalah masyarakat.

---

<sup>35</sup> Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta :PT Gramedia. 1997, hal. 162

<sup>36</sup> Husaini husaman, *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta, Bumi Aksara, 1995, hal 147.

<sup>37</sup> Koentjaraningrat, op.Cit. hal 165.

<sup>38</sup> Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.



**Tabel III.1**

**Daftar Informan Secara *Purposive Sampling***

No	Nama	Jenis Kelamin	Partai politik/lembaga	Jabatan
1	Ibnu Azis	Laki-laki	PKS	Wakil Ketua DPD PKS/Caleg terpilih 2009-2014
2	Darwin	Laki-laki	PKS	Caleg Terpilih
3	Mustafa	Laki-laki	PKS	Caleg
4	Diah Ayuliningtias	Perempuan	PKS	Caleg
5	Fitria Belladona	Perempuan	PKS	Caleg
6	Rachmat Aris	Laki-laki	Demokrat	Sekretaris Partai /Ketua DPRD Bukittinggi
7	Zulkifli	Laki-laki	Bapillu	Anggota
8	.Aisyah	Perempuan	Demokrat	Caleg
9	E.Dt.Rajo Malenggang	Laki-laki	Tokoh Masyarakat	Ketua LPM Kubu Tanjung Bukittinggi
10	Indra Sukma	Laki-laki	Tokoh Masyarakat	Lurah Kubu Tanjung

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan suatu proses sistematis untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian. Jenis data terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari informan yang dilakukan dengan wawancara langsung terhadap responden, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumentasi, studi kepustakaan dan data-data yang berkaitan dengan strategi kelima partai-partai pemenang tersebut, baik kader maupun simpatisan partai. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi.

### **1. Teknik Wawancara**

Teknik wawancara merupakan metode untuk menjelaskan data agar peneliti dengan mudah memahami data yang ada di lapangan. Teknik wawancara yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas dan mendalam, dengan menggunakan pernyataan yang telah dibuat dalam wawancara yang hanya bersikap pokok-pokok pikiran mengenai hal-hal yang dinyatakan pada saat wawancara berlangsung.

Sebelum melakukan wawancara terhadap informan yang telah ditentukan, terlebih dahulu peneliti membuat pedoman wawancara yang berisikan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan proses rekrutmen yang dilakukan oleh kedua partai tersebut. Dalam penelitian ini proses wawancara dilakukan dengan alat Bantu berupa *Tipe Recorder dan Interview Guide* (panduan wawancara). Tujuan digunakannya alat-alat



tersebut agar dapat merekam keterangan-keterangan yang diberikan informan secara lebih rinci dan mempermudah dalam menyimpulkan hasil wawancara yang kemudian disusun secara sistematis untuk menganalisis data hasil penelitian.

## **2. Dokumentasi**

Pengumpulan data yang peneliti lakukan juga memanfaatkan dokumentasi yang ada. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca, mempelajari dan menganalisis bahan-bahan yang mendukung penelitian, seperti buku-buku, arsip-arsip, artikel dan lain-lain.

Dokumentasi yang digunakan berupa arsip-arsip dari Partai Keadilan Sejahtera dan partai Demokrat di kota Bukittinggi ataupun data yang berkaitan dengan pola rekrutmen masing-masing partai.

## **G. Uji Keabsahan Data**

Sebagai bahan untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini maka dilakukan dengan cara triangulasi data. Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan data dengan memanfaatkan data yang lain diluar data tersebut<sup>39</sup>. Dalam melakukan pengujian terhadap data yang diperoleh, peneliti melakukan pengujian dengan cara menanyakan pertanyaan yang sama kepada informan yang berbeda. Hal ini dilakukan dengan membuat beberapa poin pertanyaan

---

<sup>39</sup> Moleong, op.cit, 19.

yang sama terhadap informan yang berbeda. Apabila data yang diperoleh dari informan yang berbeda mempunyai kesamaan atau saling mendukung maka dapat diperoleh suatu kesimpulan. Triangulasi data yang peneliti pilih adalah triangulasi sumber dengan menanyakan kepada sumber-sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu 2009 khususnya di Kota Bukittinggi.

#### **H. Analisis Data**

Setelah data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian data dianalisis. Analisis data adalah proses pengorganisasian data ke dalam pola, kategori dan uraian dasar dengan cara mengumpulkan, mengurutkan, mengelompokkan dan mengkategorikan data sehingga mudah diinterpretasikan dan dipahami. Data yang didapat melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dapat dianalisis dengan metode kualitatif melalui interpretasi etik dan emik. Dalam penelitian kualitatif informasi etik merupakan pandangan dari peneliti sendiri, dan informasi emik merupakan pandangan dari para informan.

Kedua informasi ini dianalisis oleh peneliti dengan pengetahuan dan pedoman paradigma, teori-teori, pendapat-pendapat ilmiah yang menunjang apa yang disampaikan oleh informan, disertai dengan literatur yang ada. Analisis data dalam penelitian ini bersifat deskriptif (menggambarkan) tanpa mengabaikan data yang bersifat kuantitatif. Peneliti ini didasarkan pada pertanyaan yang disusun dalam wawancara, observasi dan melalui dokumentasi yang ada.



## **BAB IV**

### **DESKRIPSI LOKASI DAN OBJEK PENELITIAN**

Penelitian ini berlokasi di Kota Bukittinggi, adapun yang menjadi objek penelitiannya adalah partai politik yang melakukan fungsi rekrutmen politik khususnya terhadap caleg perempuan pada pemilu legislatif Kota Bukittinggi untuk periode 2009-2014, yang mana saat pemilu legislatif tahun 2009 adanya kenyataan yang menunjukkan menurunnya keterwakilan perempuan pada pemilu 2009 di Kota Bukittinggi yang sama sekali tidak di dorong oleh pembatalan terhadap salah satu pasal dalam UU Pemilu Nomor 10 yaitu pasal 214, yang seharusnya dapat meningkatkan representasi keterwakilan perempuan dengan dirubahnya sistem nomor urut menjadi suara terbanyak sehingga dapat memberikan dukungan bagi keterwakilan perempuan namun menyebabkan menurunnya jumlah perempuan.

Kedua yaitu Dengan kenaikan jumlah penduduk dari tahun ketahun yang diiringi dengan kenaikan jumlah pemilih perempuan yang tidak membawa pengaruh bagi keterwakilan perempuan. Dan yang ketiga adalah kesamaan jumlah angka untuk calon legislatif yang diusung masing-masing partai rupanya juga tidak dapat menjamin partai tersebut memperoleh hasil yang sama untuk jumlah kursi keterwakilan perempuan.

Karena adanya permasalahan pola rekrutmen ini maka peneliti berasumsi bahwa untuk mendapatkan kursi untuk perempuan ternyata bukanlah semata-mata bisa didorong oleh tindakan afirmatif yang diakomodasikan pemerintah melalui

UU yang mengatur tentang sistem keterwakilan perempuan dalam pemilu guna peningkatan keterwakilan perempuan atau peningkatan jumlah namun pengaruh utama untuk peningkatan keterwakilan perempuan tetapi juga dipengaruhi oleh proses rekrutmen yang dilakukan oleh partai.

Maka berdasarkan fenomena ini peneliti sangat tertarik untuk melakukan sebuah penelitian tentang bagaimana proses rekrutmen kader perempuan PKS dan Demokrat pada pemilu legislatif 2009-2014 di Kota Bukittinggi. Adapun gambaran penelitian yang di kemukakan yaitu keterangan umum tentang partai yang akan menjadi objek penelitian yaitu: partai Demokrat dan PKS, berupa sejarah pembentukan partai Demokrat dan PKS, pengesahan partai Demokrat dan Visi, Misi dan Tujuan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat dan PKS Kota Bukittinggi serta sekilas tentang gambaran seputar pemilu legislatif periode 2009-2014 di Kota Bukittinggi.

#### **A. Gambaran Umum tentang Objek Penelitian (Partai Demokrat dan PKS).**

##### **1. Sejarah Pembentukan dan Berdirinya Partai Demokrat**

Partai Demokrat sebagai sebuah partai politik didirikan pada tanggal 9 September 2001. Berdirinya Partai Demokrat ini tidak terlepas dari inisiatif Susilo Bambang Yudhoyono. Susilo Bambang Yudhoyono merasa tergerak untuk membentuk sebuah partai baru



ketika ia mengalami kekalahan terhotmatnya pada pemilihan calon wakil presiden dalam sidang MPR tahun 2001. Popularitas Susilo Bambang Yudhoyono pun mulai terlihat dari hasil perolehan suara calon wakil presiden tersebut.

Hal tersebut pula yang kemudian menggundang kerteterarikan beberapa orang untuk menjadikan Susilo Bambang Yudhoyono tidak hanya sebagai calon wakil presiden melainkan sebagai sosok pemimpin bangsa yang direncanakan mampu menjadi Presiden RI dimasa yang akan datang. Salah satu orang yang mempunyai pemikiran seperti itu adalah Vance Rumangkang. Vance Rumangkang menyatakan dukungannya untuk mengusung Susilo Bambang Yudhoyono ke kursi Presiden RI, dan bahwa agar cita-cita tersebut bisa terlaksana, jalan satu-satunya adalah mendirikan partai politik.

Dalam menindaklanjuti hal tersebut, perumusan konsep dasar dan platform partai pun kemudian dilakukan. Perumusan konsep dasar dan platform partai dilakukan oleh Tim Krisna Bambu Apus dan selanjutna mengenai teknis administrasi diselesaikan oleh tim yang dipimpin oleh saudara Vance Rumangkang. Selanjutnya, pada tanggal 12 Agustus 2001 pukul 17.00 diadakan rapat yang langsung dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono di apartemen Hilton untuk membentuk tim pelaksana yang nantinya akan mengadakan pertemuan secara maraton setiap hari. Tim itu terdiri dari: Vance Rumangkang,

Drs. A. Yani Wahid, Achmad Kurnia, Adhiyaksa Dault, SH, Baharuddin Tonti, Shirato Syafei<sup>40</sup>.

Selanjutnya, dalam merealisasikan pembentukan sebuah partai politik, pada tanggal 20 Agustus 2001 Vance Rumangkang dengan dibantu oleh Drs. Sutan Bhatoegana berusaha mengumpulkan orang-orang. Pada akhirnya terbentuklah Tim 9 yang beranggotakan 10 orang yang bertugas untuk mematangkan konsep-konsep pendirian sebuah partai politik, yaitu: Vance Rumangkang, Dr. Ahmad Mubarak, MA, Drs. A. Yani Wachid, Prof. Dr. Subur Budhisantoso, Prof. Dr. Irzan Tanjung, RMH. Heroe Syswanto Ns, Prof. DR. RF. Saragih, SH, MH, Prof. Dardji Darmodihardjo, Prof. Dr. Ir. Rizald Max Rompas dan Prof. Dr T Rusli Ramli, MS<sup>41</sup>

Sebagai mana diketahui untuk menjadi sebuah partai politik yang disahkan oleh undang-undang Kepartaian dibutuhkan minimal 50 orang sebagai pendirinya. Namun dalam mendirikan Partai Demokrat ini mencul gagasan agar pendiri partai politiknya dilengkapi saja menjadi 99 orang, yang juga mempunyai hubungan dengan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pengagas yang lahir tanggal 9 bulan 9. Untuk itu pada tanggal 9 September 2001, bertempat di gedung Graha Pratama Lantai XI, Jakarta Selatan dihadapan Notaris Aswendi Kamuli, SH, 46 orang dari 99 orang menyatakan bersedia menjadi

---

<sup>40</sup> Lihat Arsip DPC Partai Demokrat Kota Bukittinggi

<sup>41</sup> *ibid*



pendiri Partai Demokrat, sedangkan 53 orang lainnya tidak dapat hadir, namun telah memberikan surat kuasanya kepada Vance Rumangkang.

Selanjutnya, sebagai sebuah partai politik kepengurusan Partai Demokrat pun mulai disusun sebagai mana mestinya. Dalam penyusunan kepengurusan disepakati bahwa kriteria calon ketua umum adalah putra Indonesia asli, kelahiran Jawa dan beragama Islam, sedangkan calon sekretaris jendral adalah dari luar Jawa dan beragama Kristen. Setelah diadakan penelitian, maka Prof. Dr. Subur Budhisantoso sebagai Pejabat Ketua Umum dan Prof. Dr. Irsan Tandjung sebagai Pejabat Sekretaris Jendral, dan Bendahara umum dijabat oleh Vance Rumangkang.<sup>42</sup>

## **2. Pengesahan Partai Demokrat**

Setelah Partai Demokrat telah memenuhi syarat untuk menjadi sebuah partai politik yang sesuai dengan Undang-Undang Kepartaian. Maka pada tanggal 10 September 2001 Partai Demokrat didaftarkan kepada Departemen Kehakiman dan HAM<sup>43</sup>.

Pada tanggal 10 September 2001 jam 10.00 WIB Vance Rumangkang, saudara Prof. Dr. Subur Budhisantoso, saudara Prof. Dr. Irsan Tandjung, saudara Drs. Sutan Bhatogana MBA, saudara Prof. Dr.

---

<sup>42</sup> *ibid*

<sup>43</sup> *ibid*

Rusli Ramli dan saudara Prof. Dr. RF. Saragih, SH, MH mendaftarkan Partai Demokrat ke Departemen Kehakiman dan HAM RI oleh dan diterima oleh Ka SUBDIT Pendaftaran Departemen Kehakiman dan HAM. Selanjutnya dalam menindaklanjuti hal tersebut, maka pada tanggal 25 September 2001 terbitlah Surat Keputusan Menkeh & HAM Nomor M.MU.06.08.-138 tentang pendaftaran dan pengesahan Partai Demokrat. Dengan terbitnya Surat Keputusan tersebut maka Partai Demokrat telah resmi menjadi salah satu partai politik di Indonesia.

Kemudian pada tanggal 9 Oktober 2001 Departemen Kehakiman dan HAM RI mengeluarkan Lembaran Berita Negara Nomor : 81 Tahun 2001 Tentang Pengesahan Partai Demokrat dan Lambang Partai Demokrat. Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan dan dilanjutkan dengan Rapat Kerja Nasional (Rakemas) Pertama pada tanggal 18-19 Oktober 2002 di Hotel Indonesia yang dihadiri Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) seluruh Indonesia.

Sejalan dengan deklarasi berdirinya Partai Demokrat, sebagai perangkat organisasi dibuatlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Sebagai langkah awal maka pada tahun 2001 diterbitkan AD/ART yang pertama sebagai peraturan sementara



organisasi. Pada tahun 2003 diadakan koreksi dan revisi sekaligus didaftarkan ke Departemen Kehakiman dan HAM RI sebagai Persyaratan berdirinya Partai Demokrat.

### **3. Visi, Misi dan Tujuan Partai Demokrat**

#### **a. Visi Partai Demokrat**

Partai Demokrat bersama masyarakat luas berperan mewujudkan keinginan luhur rakyat Indonesia agar mencapai pencerahan dalam kehidupan berbangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur, munjung tinggi semangat nasionalisme, humanism, dan internasionalisme, atas dasar ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam tatanan dunia baru yang damai, demokratis dan sejahtera.

#### **b. Misi Partai Demokrat**

*Pertama* adalah memberikan garis yang jelas agar partai berfungsi secara optimal dengan peranan yang signifikan di dalam seluruh proses pembangunan Indonesia baru yang dijiwai oleh semangat reformasi serta pembaharuan dalam semua bidang kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan kedalam formasi semula sebagaimana telah diikrarkan oleh para pejuang, pendiri pencetus proklamasi kemerdekaan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan titik berat kepada upaya

mewujudkan perdamaian, demokrasi (Kedaulatan rakyat) dan kesejahteraan.

*Kedua*, meneruskan perjuangan bangsa dengan semangat kebangsaan baru dalam melanjutkan dan merevisi strategi pembangunan Nasional sebagai tumpuan sejarah bahwa kehadiran partai Demokrat adalah melanjutkan perjuangan generasi-generasi sebelumnya yang telah aktif sepanjang sejarah perjuangan bangsa Indonesia, sejak melawan penjajah merebut Kemerdekaan, merumuskan Pancasila dan UUD 1945, mengisi kemerdekaan secara berkesinambungan hingga memasuki era reformasi.

*Ketiga*, memperjuangkan tegaknya persamaan hak dan kewajiban Warganegara tanpa membedakan ras, agama, suku dan golongan dalam rangka menciptakan masyarakat sipil (civil society) yang kuat, otonomi daerah yang luas serta terwujudnya representasi kedaulatan rakyat pada struktur lembaga perwakilan dan permusyawaratan.



### **c. Tujuan Partai Demokrat**

1. Menegakkan, mempertahankan dan mengamankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai jiwa proklamasi kemerdekaan.
2. Mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, sebagai mana diwujudkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
3. Melakukan segala usaha dan ikhtiar untuk membangun masyarakat Indonesia baru yang berwawasan nasionalisme, pluralism, dan humanism.
4. Meningkatkan partisipasi seluruh potensi bangsa dalam mewujudkan kehidupan bernegara yang memiliki pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, serta dinamis menuju terwujudnya Indonesia yang demokratis, sejahtera, maju, modern dalam suasana aman dan penuh kedamaian lahir dan batin.

### **B. Sejarah Pembentukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)**

PKS adalah partai politik dengan model gerakan politik konservatif yaitu mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam berbagai gerakan politiknya, sehingga menjadi pemahaman tersendiri bagi PKS bahwa dakwah dan amal siyasi adalah dua hal yang tidak boleh dipisahkan.

Partai keadilan sejahtera (PKS) didirikan di Jakarta pada tanggal 20 April 2002<sup>44</sup>. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan kelanjutan dari Partai Keadilan (PK) yang didirikan di Jakarta 9 Jumadil tJla 1423 H yang bertepatan pada tanggal 20 April 2002, partai ini lahir dari sekumpulan anak-anak muda terdidik yang senantiasa melakukan aktivitas pengajian di kampus-kampus. Aktivitas mengkaji itu kemudian diikuti dengan keinginan menerapkan atau mengimplementasikan dalam realitas kehidupan. Dan tampil sebagai sebuah kekuatan sosial politik di Indonesia adalah sebagai bukti nyata implementasi gerakannya. Dengan kata lain, eksistensi gerakan sosial politik kelompok ini merupakan konsekuensi logis dari sebuah eksistensi ideologis yang teruji ketangguhannya dalam kurang lebih 20 tahun kehadirannya di Indonesia.

Sebelum terwujud ke dalam sebuah partai, orang-orang PKS adalah orang-orang yang lebih bergelut di seputar kegiatan dakwah. Sesuai dengan kondisi Orde Baru yang sangat represif dan “anti Islam”, gerakan mereka bersifat bawah tanah karena kegiatan mereka relatif tertutup dan terbentuk dalam kelompok-kelompok kecil (gerakan usroh atau tarbiyyah). Mereka relatif mengisolasi diri untuk bersentuhan dengan kegiatan politik karena jika mereka tampil dalam wacana ini maka yang akan terjadi adalah kegagalan dengan ditangkap, diintimidasi, dimatisosialkan, dan akhirnya lebur ke dalam suasana mayoritas yang diam terhadap represi dan ketidakadilan Orde Baru.

---

<sup>44</sup> Lihat arsip PKS kota Bukittinggi



Walau mengisolasi diri, bukan berarti mereka adalah sekumpulan orang-orang yang asing dan berjarak dengan negara Indonesia. Mereka mengisolasi diri untuk membentuk masyarakat yang solid untuk melawan kediktatoran. Terbukti ketika Orde Baru mulai melemah, mereka segera ambil posisi, meskipun pada awalnya aktivitas mereka hanya mengambil tema-tema dunia Islam internasional seperti soal Palestina ataupun Bosnia. Walau demo-demo yang mereka gelar diikuti massa yang sangat besar, namun mereka aman dari represi pemerintah pada saat itu. Hal itu sebenarnya dijadikan ajang pelatihan karena massa mereka merupakan yang paling efektif, berdisiplin, dan damai.

Gerakan reformasi Mei 1998, menjadi saat dimana mereka benar-benar menghadapkan diri ke publik, sehingga publik pun menyadari ada kekuatan yang besar yang terorganisasi dengan rapi yang sebelumnya berada di bawah permukaan. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) lahir sebagai gerakan sosial keagamaan, karena dari awal pertumbuhan gerakan ini di kampus-kampus, agama Islam lebih tepatnya esensi atau nilai dari Islam itu sendiri menjadi nilai utama yang selalu dikedepankan, bukan hanya sekedar wacana belaka, tetapi juga implementasi praksisnya. Islam adalah agama yang sempurna” mencakup seluruh urusan kehidupan manusia yang terdiri dari kehidupan individu, keluarga, masyarakat, dan negara” serta segala aktivitas yang meliputinya, seperti ekonomi (al-Iqtishadiyah), politik (as-Siyasiyah), pendidikan (ar-Tarbawtyah), hukum (at-hukniyah) dan sebagainya.

Islam tidak memilah antara kehidupan dunia dan akhirat, karenanya dalam setiap aktivitas mengandung unsur dunia dan akhirat sekaligus.

Partai keadilan mengemban amanah dakwah demi mewujudkan cita-cita universal dan menyalurkan aspirasi politik kaum muslimin beserta seluruh lapisan masyarakat Indonesia, seiring berkembangnya dinamika aspirasi masyarakat dan untuk menjamin kelangsungan dakwah maka partai keadilan menjelmakan diri menjadi partai keadilan sejahtera (PKS).

### **1. Visi, Misi dan Tujuan Partai Keadilan Sejahtera**

PKS memiliki visi “terwujudnya masyarakat yang adil, sejahtera dan bermartabat”, dengan misi : (1)mempelopori reformasi sistem politik, pemerintahan dan birokrasi, peradilan dan militer untuk berkomitmen terhadap penguatan demokrasi, (2)mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat serta (3)menuju pendidikan berkeadilan dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh rakyat Indonesia<sup>45</sup>.

Lembaga tinggi partai disebut dewan pimpinan tingkat pusat yang berfungsi sebagai badan pekerja majelis syuro, beranggotakan: ketua majelis pertimbangan pusat, presiden partai, ketua dewan syariat pusat, sekretaris, jendral dewan pengurus pusat dan bendahara umum dewan pengurus pusat. Untuk yang berkedudukan di provinsi disebut dewan pimpinan tingkat

---

<sup>45</sup> *Ibid*



wilayah, terdiri dari majelis pertimbangan wilayah, dewan pengurus wilayah, dan dewan syariat wilayah, sedangkan yang berpusat di kabupaten/kota disebut dewan pimpinan tingkat daerah, terdiri dari: majelis pertimbangan daerah, dewan pengurus daerah dan dewan syariat daerah.

### **C. Gambaran Pemilu Legislatif Periode 2009-2014 Kota Bukittinggi**

Kenyataan yang menunjukkan menurunnya keterwakilan perempuan pada pemilu 2009 di Kota Bukittinggi yang sama sekali tidak di dorong oleh yaitu pertama pembatalan terhadap salah satu pasal dalam UU Pemilu Nomor 10 yaitu pasal 214, yang seharusnya dapat meningkatkan representasi keterwakilan perempuan, karena telah dirubahnya sistem nomor urut menjadi suara terbanyak sehingga dapat memberikan dukungan bagi keterwakilan perempuan namun malah makin menyebabkan menurunnya jumlah perempuan. Kedua yaitu Dengan kenaikan jumlah penduduk dari tahun ketahun yang diiringi dengan kenaikan jumlah pemilih yang tidak membawa pengaruh positif bagi keterwakilan perempuan. Dan yang ketiga adalah kesamaan jumlah angka untuk calon legislatif yang diusung masing-masing partai rupanya juga tidak dapat menjamin partai tersebut memperoleh hasil yang sama untuk jumlah kursi keterwakilan perempuan.

Berdasarkan uraian dan fakta di atas, serta memperhatikan pokok-pokok permasalahan yang ada, maka peneliti ingin meneliti tentang rekrutmen untuk kader perempuan yang dilakukan masing-masing partai

yang mengikuti pemilu legislatif di Kota Bukittinggi guna peningkatan keterwakilan perempuan. PKS dan Demokrat adalah dua partai yang menggambarkan perbedaan yang mencolok untuk perolehan jumlah kursi untuk perempuan di DPRD Kota Bukittinggi sehingga kedua partai ini akan menjadi objek pada penelitian ini yaitu tentang bagaimana "Proses Rekrutmen Kader Perempuan PKS dan Demokrat Pada Pemilu Legislatif 2009-2014 di Kota Bukittinggi".





## **BAB V**

### **PROSES REKRUITMEN KADER PEREMPUAN PKS DAN DEMOKRAT PADA PEMILU LEGISLATIF 2009-2014 DI KOTA BUKITTINGGI**

Menjelang berlangsungnya pemilu legislatif periode 2009-2014 di Kota Bukittinggi, setiap partai politik yang menjadi peserta dalam pemilu telah melakukan berbagai persiapan untuk dapat berkompetisi di dalam pesta pemilihan wakil rakyat tersebut. Salah satu persiapan yang paling utama bagi masing-masing partai politik adalah melakukan rekrutmen politik. Karena rekrutmen politik adalah fungsi partai politik yang paling mendasar maka fungsi rekrutmen politik tersebut dilakukan sebaik-baiknya oleh partai politik. Setiap partai politik berkewajiban merekrut orang-orang untuk dijadikan caleg utusan atau perwakilan partai. Caleg- caleg yang terpilih dari masing-masing partai inilah yang nantinya diverifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum, dan apabila telah disetujui maka caleg- caleg dikirim ke arena pemilu legislatif yang kemudian nantinya dipilih oleh masyarakat.

Sesuai dengan isi yang tertera didalam Undang-Undang Pemilu Nomor 10 Tahun 2008, yang merupakan salah satu bentuk usaha pemerintah dalam menjawab tantangan dalam hal peningkatan keterwakilan perempuan agar terlaksananya *affirmative action* dalam penyelenggaraan pemilu 2009. Maka dengan sendirinya setiap partai politik harus memperhatikan kuota 30% perempuan dalam tugas rekrutmennya. Untuk memenuhi tantangan akan

permintaan caleg perempuan ini maka partai politik harus mempunyai suatu proses perekrutan caleg perempuan yang jelas, terstruktur serta dilengkapi dengan tahap-tahap kerja.

Proses rekrutmen yang dilakukan untuk penjangkaran caleg perempuan pada masing-masing partai akan mempengaruhi hasil akhir yang akan didapat oleh partai tersebut. Karena setiap partai politik pasti akan menggunakan proses rekrutmen yang berbeda sehingga jumlah angka perolehan untuk keterwakilan perempuan dalam pemilu pun akan berbeda pula pada setiap partai politik. Fenomena ini terlihat pada pemilu yang dilaksanakan di Kota Bukittinggi periode 2009-2014.

Pemilu legislatif periode 2009-2014 yang diselenggarakan di Kota Bukittinggi mengalami penurunan, yaitu tidak adanya peningkatan keterwakilan perempuan dari pemilu sebelumnya. Maka dari fenomena ini peneliti berasumsi bahwa pola rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik tentunya belum baik, makanya peneliti ingin melakukan penelitian tentang proses rekrutmen dari partai politik khususnya dalam merekrut caleg perempuan pada pemilu legislatif periode 2009-2014 di Kota Bukittinggi.

Pada pemilu legislatif periode 2009-2014 Kota Bukittinggi banyak partai politik yang ikut dalam pencalonan, akan tetapi penelitian ini hanya mengambil beberapa partai politik yang akan dijadikan sebagai objek penelitian, partai politik tersebut adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat.



**A. Proses Rekrutmen Caleg Perempuan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Demokrat pada Pemilu Legislatif Periode 2009-2014 kota Bukittinggi.**

Pada pemilu legislatif periode 2009-2014 di Kota Bukittinggi partai politik telah melakukan berbagai tahap persiapan dalam menjaring para calon legislatifnya. Perekrutan yang dilakukan oleh kader-kader partai kepada calon legislatifnya juga dengan melihat kecocokan antara calon legislatif dengan visi dan misi partainya. Partai juga mempunyai beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh calon legislatif, agar calon legislatif tersebut layak mengusung partainya dan dengan sendirinya caleg sah untuk di utus menjadi perwakilan dari partai tersebut.

Pada saat melakukan fungsi rekrutmen politik, partai politik dalam mendapatkan caleg perempuannya juga memiliki suatu signifikasi peraturan. Penetapan kriteria oleh PKS dan Demokrat terhadap para calon telah memiliki aturan yang jelas serta adanya standarisasi oleh partai tersebut. Walaupun persyaratan yang telah ditetapkan oleh partai masih bersifat umum, tetapi ada satu hal yang tidak boleh tertinggal disaat melakukan tugas rekrutmen oleh partai politik yaitu kewajiban untuk memperhatikan kebijakan akan quota 30% perempuan.

Ada beberapa kriteria- kriteria yang harus dipenuhi oleh partai politik dalam proses perekrutan terhadap para caleg. Kriteria tersebut ada yang berasal dari negara atau disebut juga persyaratan umum. Persyaratan

umum yang menjadi pedoman semua partai politik pada proses pencalegan periode 2009-2014 Kota Bukittinggi adalah diatur UU pemilu tepatnya UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD Kab/Kota Pasal 50 yang berisikan tentang persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota (Terlampir). Dan persyaratan lain ada pula yang langsung dari lembaga yang bertugas didalam proses perekrutan yaitu partai politik itu sendiri.

Kriteria-kriteria khusus yang langsung berasal dari partai politik, disebut dengan persyaratan khusus. Persyaratan khusus yaitu persyaratan yang berasal dari masing-masing lembaga yang melakukan tugas rekrutmen politik. Persyaratan khusus yang dimaksud mempedomani Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai politik, seperti yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Demokrat.

Masing-masing partai politik memiliki proses rekrutmen yang berbeda dalam mendapatkan para calon legislatif termasuk calon untuk legislatif perempuan. Dibawah ini akan dijelaskan tentang proses rekrutmen caleg perempuan oleh masing-masing partai pada pemilu legislatif periode 2009-2014 di Kota Bukittinggi



# **1. Proses Rekrutmen Caleg Perempuan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Pemilu Legislatif Periode 2009-2014 di Kota Bukittinggi**

Untuk menjelaskan bagaimana proses penyeleksian calon- calon legislatif pada PKS maka peneliti menggunakan bentuk seleksi calon yang dikemukakan oleh Alan Ware. Alan Ware menggunakan lima cara dalam prosedur seleksi. Lima cara ini akan digunakan untuk mendeskripsikan proses rekrutmen pada Partai Keadilan Sejahtera yaitu:

## **a. Prosedur dan ketentuan dalam proses penyeleksian PKS.**

Proses rekrutmen yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera dilaksanakan dengan menggunakan suatu signifikasi peraturan. Ada beberapa kriteria- kriteria atau peraturan yang harus dipenuhi oleh PKS dalam proses perekrutan terhadap para caleg. Kriteria pertama berasal dari negara atau disebut juga persyaratan umum dan kriteria kedua berupa kriteria-kriteria khusus yang langsung berasal dari PKS.

Persyaratan umum yang menjadi pedoman semua partai PKS pada proses pencalegan periode 2009-2014 kota Bukittinggi adalah diatur UU pemilu tepatnya UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD Kab/Kota Pasal 50 yang berisikan tentang persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota.

Kriteria-kriteria khusus yang langsung berasal dari partai politik, disebut dengan persyaratan khusus. Persyaratan khusus yang menjadi aturan PKS yaitu mempedomani Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PKS:

*“Dalam proses penyeleksian caleg PKS mempedomani UU serta mempedomani Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PKS”<sup>46</sup>.*

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa proses rekrutmen yang dilakukan oleh PKS berdasarkan kepada dua aturan atau prosedur yaitu prosedur/ketentuan yang berasal dari negara dan ketentuan yang berasal dari partai itu sendiri. Walaupun PKS menjalankan aturan dari pemerintah yaitu mematuhi dan menjalankan UU pemilu dalam proses rekrutmen, namun proses seleksi tersebut tetap mempedomani aturan partai (AD/ART).

#### **b. Batas seleksi dalam proses penyeleksian PKS.**

Dalam melaksanakan proses seleksi untuk mengikuti pemilihan umum, PKS mensentralisasikan tugas- tugas rekrutmen itu kepada unit-unit lokal. Unit-unit lokal yang dimaksud adalah unit-unit/ anak-anak

---

<sup>46</sup> Wawancara dengan wakil ketua DPD PKS Bukittinggi/ Caleg Terpilih Bukittinggi Periode 2009-2014 yaitu Ibnu Aziz pada tanggal 16 Mei 2011 di sekretariat PKS dan wawancara dengan Caleg Terpilih Bukittinggi Periode 2009-2014 yaitu Darwin.



partai yang ada di tingkat kelurahan/desa (Dewan Pengurus Ranting), tingkat kabupaten/kota (Dewan Pengurus Daerah), tingkat provinsi (Dewan Pengurus Wilayah) dan partai ditingkat Pusat. Masing- masing jenjang –jenjang partai ini mempunyai tugas untuk melakukan persiapan untuk pemilihan umum.

Persiapan tersebut juga dilakukan oleh PKS pada Dewan Perwakilan Daerah Bukittinggi. Untuk mengikuti pemilu legislatif periode 2009-2014 di Kota Bukittinggi, Partai Keadilan Sejahtera telah terlebih dahulu melakukan berbagai tahap- tahap persiapan. Persiapan yang dimaksud yaitu kurang lebih setahun sebelum pemilihan umum dilaksanakan, PKS membentuk suatu kepanitiaan. Pernyataan ini disampaikan oleh salah satu calon legislatif PKS yaitu:

*“Seperti partai-partai lain pada umumnya, PKS juga memulai persiapan untuk mengikuti pemilihan umum. PKS memulai tahap-tahap persiapan untuk pemilihan umum kurang lebih satu tahun sebelum diadakannya pemilu. Untuk maju dalam pemilu April 2009 kemaren, kami telah memulai persiapan dari bulan maret setahun sebelumnya”<sup>47</sup>.*

Panitia- panitia yang dibentuk oleh PKS dikenal dengan sebutan Panitia Jaring Mutiara. Jaring mutiara adalah suatu program pembentukan panitia yang bertugas menjaring kader-kader terbaik PKS yang akan diusung menjadi wakil dari PKS:

---

<sup>47</sup> Wawancara dengan wakil ketua DPD PKS Bukittinggi/ Caleg Terpilih Bukittinggi Periode 2009-2014 yaitu Ibnu Aziz pada tanggal 16 Mei 2011 di sekretariat PKS

*“Pada intinya jaring mutiara adalah sebuah mekanisme yang disiapkan untuk memilih dan memilah para calon legislatif PKS dari berbagai tingkatan yaitu kabupaten/kota, provinsi dan nasional”<sup>48</sup>*

Panitia-panitia ini dibentuk pada setiap jenjang-jenjang partai. Mulai dari tingkat kelurahan/desa ( Dewan Pengurus Ranting), tingkat kabupaten/kota (Dewan Pengurus Daerah), sampai kepada tingkat provinsi (Dewan Pengurus Wilayah). Setiap Dewan Pengurus Wilayah membagi tugas pembentukan panitia tersebut kepada Dewan-Dewan Pengurus Daerahnya, begitu juga dengan Dewan Pegurus Daerah mengutus pembentukan Panitia kepada pengurus cabang dan ranting.

Pembentukan panitia jaring mutiara adalah untuk menjaring bakal calon yang akan maju pada pemilu. Bakal calon yang akan direkrut oleh panitia jaring mutiara pada setiap DPC, DPD, DPW dan Pusat, maka akan mewakili PKS pada daerah masing-masing. Panitia jaring mutiara dibentuk pada rapat/musyawarah partai disetiap DPC, DPD, DPW. Masing- masing DPC akan bertanggungjawab pada DPD msing- masing, begitu juga dengan DPD.

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan wakil ketua DPD PKS Bukittinggi/ Caleg Terpilih Bukittinggi Periode 2009-2014 yaitu Ibnu Aziz pada tanggal 16 Mei 2011 di sekretariat PKS dan wawancara dengan Caleg Terpilih Bukittinggi Periode 2009-2014 yaitu Darwin.



Jenis-jenis musyawarah PKS berdasarkan jenjang pengambilan keputusan adalah<sup>49</sup> :

- a. Musyawarah Majelis Syura
- b. Musyawarah Nasional
- c. Musyawarah Wilayah
- d. Musyawarah Daerah
- e. Musyawarah Cabang
- f. Musyawarah Ranting

Panitia Jaring Mutiara beranggotakan anggota- anggota/kader-kader PKS pada masing-masing DPR, DPC, DPD, DPW PKS. Jenjang keanggotaan PKS adalah<sup>50</sup>:

- a. Anggota pendukung yang terdiri atas:
  - 1). Anggota Pemula dan
  - 2). Anggota Muda
- b. Anggota Inti yang terdiri atas:
  - 1). Anggota Madya
  - 2). Anggota Dewasa
  - 3.). Anggota Ahli
  - 4). Anggota Purna

---

<sup>49</sup> Yang tertuang dalam Platform Kebijakan Pembangunan Falsafah Dasar Perjuangan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga(ASD/ART) Partai Keadilan Sejahtera(PKS).

<sup>50</sup> Yang tertuang dalam Platform Kebijakan Pembangunan Falsafah Dasar Perjuangan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga(ASD/ART) Partai Keadilan Sejahtera(PKS)

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam proses seleksi yang dilakukan oleh PKS terjadi dalam satu kekuasaan partai namun proses tersebut disentralisasikan kepada unit-unit lokal. Yaitu dapat terlihat pada proses penjangkaran yang dipercayakan dan disebar pada masing-masing kabupaten/kota, kabupaten kota pun mensentralisasikan kepada tim/ panitia penjangkaran yang lebih kecil ( panitia Jaring Mutiara).

**c. Kekuasaan unit pengambil keputusan dalam proses penyeleksian PKS.**

Diantara program dari jaring mutiara adalah melaksanakan pemilu internal. Pemilu internal ini dilakukan oleh partai sebagai salah satu bentuk persiapan dalam menghadapi pemilu yang nantinya akan diselenggarakan. Pemilu internal yang dimaksud oleh PKS yaitu:

*“Suatu tahap pemilihan bakal calon legislatif yang dilakukan oleh kader, dari kader dan untuk kader”<sup>51</sup>*

Pemilu internal (PUI) dilaksanakan oleh PKS sebagai bentuk persiapan untuk menghadapi pemilu yang akan terselenggara. Berdasarkan Pemilu Internal ini PKS mendapatkan gambaran tentang calon- calon legislatif yang akan dapat maju dalam pemilu. Maka berdasarkan hasil Pemilu internal (PUI) didapatlah daftar dari nama- nama bakal calon

---

<sup>51</sup> Wawancara dengan wakil ketua DPD PKS Bukittinggi/ Caleg Terpilih Bukittinggi Periode 2009-2014 yaitu Ibnu Aziz pada tanggal 16 Mei 2011 di sekretariat PKS



legislatif yang telah disiapkan oleh jaring mutiara setahun sebelum dilaksanakannya pemilihan umum.

Daftar nama-nama bakal calon legislatif yang telah diresmikan oleh panitia jaring mutiara pada pemilu internal biasanya tidak pernah mengalami perubahan walaupun setelah diseleksi oleh pusat karena bakal calon legislatif yang dipilih pada pemilu internal benar-benar orang yang dikenal oleh partai dan masyarakat umum, serta mempunyai loyalitas yang tinggi dan mempunyai bukti kinerja yang baik:

*“Pengalaman di dalam partai, bukti kinerja yang baik serta loyalitas dapat menjadikan seorang anggota internal PKS terpilih menjadi bakal calon tetap PKS. Setelah nama-nama bakal calon diusulkan dan ditetapkan maka tidak pernah diganti lagi karena sudah berdasarkan persetujuan dari bakal calon yang bersangkutan dan pengalaman kerja pun alasan utama yang sangat mendukung”<sup>52</sup>.*

Daftar nama-nama bakal calon legislatif tersebut kemudian dikirim kepada Dewan Pengurus Wilayah (DPW) dan Pusat. Dan setelah diperiksa dan disetujui oleh Pusat maka daftar nama-nama bakal calon akan dikirim lagi ke DPD di setiap daerah. Daftar nama-nama bakal calon tersebut di kirim kembali oleh DPW disertai dengan SK untuk masing – masing calon yang terpilih didalam pemilu internal partai. Dan setelah itu

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan wakil ketua DPD PKS Bukittinggi/ Caleg Terpilih Bukittinggi Periode 2009-2014 yaitu Ibnu Aziz pada tanggal 16 Mei 2011 di sekretariat PKS

barulah calon dipanggil untuk memenuhi tugasnya sebagai perwakilan dari partai untuk maju dalam pemilihan umum.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat terlihat bahwa dalam kekuasaan unit pengambil keputusan tidak dipegang oleh segolongan kecil aktor tetapi menyebar secara luas diantara para anggota dan aktifis didalam unit tersebut. Proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh PKS disentralisasikan kepada unit- unit lokal. Yaitu dapat terlihat pada proses penjangkaran yang dipercayakan dan disebar pada masing-masing DPC, kabupaten/kota (DPD), setiap kabupaten/kota pun mempunyai kekuatan atau hak dalam mengambil keputusan yaitu dengan memutuskan untuk mensentralisasikan kepada tim/ panitia penjangkaran yang lebih kecil ( panitia Jaring Mutiara) namun pada keputusan akhir yaitu penetapan nama- nama calon dan SK calon tetap berdasarkan keputusan dari partai pusat. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa unit pengambilan keputusan dalam PKS menyebar secara luas diantara para anggota DPC, DPD, DPW dan Pusat.



#### **d. Urutan posisi kandidat PKS dalam proses penyeleksian.**

Untuk proses perekrutan caleg laki-laki dan perempuan, panitia rekrutmen PKS diwajibkan untuk melaksanakan ketentuan kriteria terhadap para bacaleg, kriteria yang harus dipenuhi oleh bacaleg adalah:<sup>53</sup>

- a. Memiliki kedekatan dengan masyarakat
- b. Aktif berorganisasi
- c. Memiliki basis massa
- d. Memiliki citra yang positif

Dalam proses rekrutmen politik terhadap para caleg pada pemilu legislatif periode 2009-2014 di Kota Bukittinggi, PKS juga menghargai gender. Yaitu rekrutmen yang dilakukan oleh PKS pada pemilu legislatif periode 2009-2014 di Kota Bukittinggi tidak membedakan antara caleg laki-laki dan caleg perempuan. Di dalam proses rekrutmen tidak ada perbedaan yang dilakukan dalam mendapatkan caleg laki-laki dengan caleg perempuan, baik laki-laki maupun perempuan mendapatkan kesempatan yang sama. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ayuliningtyas saat dilakukannya wawancara bahwa:

*“Dalam melakukan rekrutmen untuk calon legislatif PKS tidak membedakan antara calon laki-laki dengan calon perempuan. Sebagai buktinya perempuan juga bisa berada pada no urut kecil”<sup>54</sup>*

<sup>53</sup> Yang tertuang dalam Platform Kebijakan Pembangunan Falsafah Dasar Perjuangan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga(ASD/ART) Partai Keadilan Sejahtera(PKS)

<sup>54</sup> Wawancara dengan Caleg PKS yaitu Dyah yuliningtyas pada 19 mei 2011 di sekretariat PKS

Istilah nomor kecil yang dimaksud oleh PKS adalah no urut teratas contohnya nomor urut satu atau dua, dimana untuk penetapan no urut caleg, PKS juga tidak membedakan no urut caleg laki-laki dan no urut caleg perempuan. Ini berarti setiap caleg sama-sama mempunyai kesempatan untuk mendapatkan no urut teratas atau disebut nomor kecil.

Penentuan urutan posisi atau no urut calon legislatif PKS untuk pemilihan umum juga dipengaruhi oleh kinerja yang dilakukan oleh calon tersebut. Karena hal tersebut adalah bentuk dari penghargaan yang diberikan partai kepada anggota, pengurus atas prestasi, jasa, dan/atau sikap perilaku disiplin sebagai anggota<sup>55</sup> :

*“No urut kecil yang diputuskan oleh partai biasanya jatuh kepada anggota atau pengurus partai yang kinerjanya tampak nyata dan tidak diragukan lagi oleh partai”<sup>56</sup>.*

Dari beberapa uraian di atas dapat terlihat bahwa urutan posisi bagi setiap kandidat/calon diseleksi oleh PKS pada setiap momen/waktu yang dibutuhkan, seperti halnya urutan posisi untuk calon yang akan maju pada pemilihan umum. Maka urutan posisi akan diputuskan dalam rapat disetiap daerah oleh badan pembuatan keputusan yang relevan yaitu anggota-anggota partai yang bertanggungjawab pada daerah atau cabang- cabang partai tersebut.

---

<sup>55</sup> Yang tertuang dalam Platform Kebijakan Pembangunan Falsafah Dasar Perjuangan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga(ASD/ART) Partai Keadilan Sejahtera(PKS)

<sup>56</sup> Wawancara dengan Caleg PKS yaitu Dyah yuliningtyas pada 19 mei 2011 di sekretariat PKS



Dalam proses perekrutan para caleg PKS juga menimbang nilai-nilai ideologi partai. Sebagai partai yang menjunjung nilai-nilai Islam PKS juga mengambil kaidah – kaidah dalam islam untuk dijadikan pedoman atau peraturan dalam proses pekekrutan calegnya. Contohnya caleg yang akan dijarah oleh kader- kader PKS selain mempunyai loyalitas yang tinggi kepada partai juga harus mampu berakhlak dan mempunyai wawasan agama islam. Sedangkan untuk menjaring calegnya PKS menggunakan dua cara .

Cara pertama yang dilakukan PKS untuk menjaring calon legislatifnya adalah memilih caleg di dalam kawasan struktural partai atau anggota internalnya. Pada dasarnya PKS lebih mengutamakan anggota internalnya karena anggota internal telah cukup mengerti dengan visi dan misi partai dan sebagai sebuah bentuk penghargaan untuk orang-orang yang berprestasi di dalam partai tersebut. Hal ini diperkuat dengan wawancara yang dilakukan oleh salah satu caleg perempuan dari PKS yaitu Ayuliningtyas yang menyampaikan bahwa:

*“PKS mengutamakan anggota partai karena anggota struktur partai telah mempunyai pengalaman berorganisasi didalam partai dan sangat memahami visi dan misi dari partai. Saya sewaktu dipilih menjadi bakal caleg, ketika saya menjabat sebagai ketua bidang kewanitaan, begitu juga dengan rekan saya sebagai caleg yaitu ibu fitria Belladona adalah pengurus partai dalam bidang kebijakan publik”<sup>57</sup>*

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan Caleg PKS yaitu Dyah yuliningtyas pada 19 mei 2011 di sekretariat PKS

Pernyataan lain juga diperkuat oleh salah seorang caleg dari PKS yaitu mustafa, setelah diwawancarai tentang bagaimana awal keterlibatan beliau dengan proses rekrutmen yang dilakukan oleh PKS, maka bapak mustafa mengatakan bahwa:

*“Pertama saya diminta untuk menghadiri rapat karena saya juga merupakan anggota partai dan juga aktif dalam berbagai kegiatan partai, dan dari rapat itu saya diminta kesediaan untuk menjadi caleg PKS. Kemudian saya terima karena merupakan amanah dari partai”*

Cara kedua PKS menjaring calon legislatif di luar internal partai. Maksudnya yaitu selain menjaring caleg dari internal atau dari kepengurusan partai PKS juga menjaring caleg dari luar partai yaitu yang bukan merupakan kader-kader partai atau pada saat dijaring belum menjadi kader partai.

PKS memilih anggota *non- intern* partai karena orang yang dipilih sangat memiliki kemampuan dan potensi, maka PKS akan langsung menawarkan sebuah kepercayaan jabatan kepada orang yang bersangkutan. Namun dalam kenyataannya atau fakta yang terjadi dilapangan calon legislatif yang diusung PKS untuk pemilu legislatif periode 2009-2011 di Kota Bukittinggi, tidak satupun berasal dari non intern partai.

Bentuk persiapan lain yang dilakukan oleh PKS untuk menghadapi pemilihan umum adalah dilakukannya pembekalan untuk setiap bakal calon legilatif. Pembekalan bakal calon ini dilakukan beberapa bulan

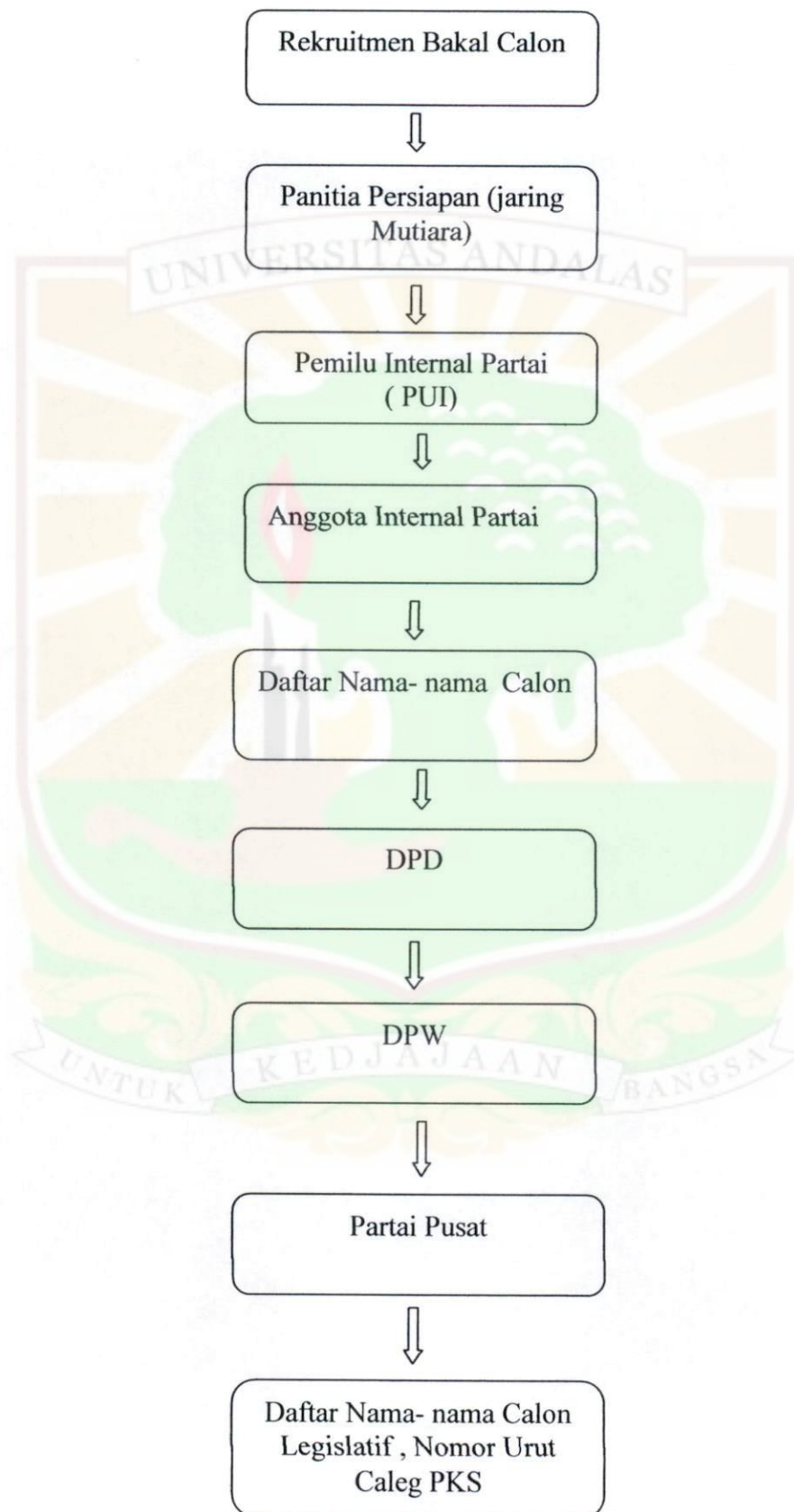


sebelum pemilu diselenggarakan. PKS memberikan pelatihan bagi calon legislatifnya. Pelatihan ini dimaksud untuk kesiapan masing-masing caleg untuk berkompetisi dalam ajang pemilihan.

Dari beberapa uraian diatas dapat dilihat bahwa ada kejelasan di dalam perekrutan caleg perempuan yang dilakukan oleh PKS. PKS hanya akan merekrut seorang caleg apabila caleg tersebut dianggap berpotensi dan sesuai dengan visi dan misi yang di usung oleh PKS. Penilaian terhadap kelayakan seseorang menjadi caleg bukan hanya berdasarkan pendapat internal partai saja. Tetapi juga berdasarkan penilaian dari masyarakat umum terhadap kinerja yang dilakukan oleh bakal calon legislatif.

Bagi PKS kriteria seseorang untuk dapat diusung menjadi caleg lebih cenderung karena keterlibatannya dan pengalamannya dalam kepengurusan partai itu sendiri. Hal ini menggambarkan bahwa PKS menggunakan salah satu kriteria rekrutmen tertutup yaitu dalam proses rekrutmen kurang dibangun relasi (*linkage*) yang baik antara partai politik dan masyarakat sipil. Walaupun memakai salah satu kriteria rekrutmen tertutup, PKS tidak bisa digolongkan kepada partai dengan sistem pemilihan tertutup. Karena tidak semua kriteria rekrutmen tertutup dipakai oleh PKS. Proses rekrutmen yang dilakukan PKS dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

**Bagan : Rekrutmen PKS**





Berdasarkan bagan di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan proses rekrutmennya PKS telah melalui tahap-tahap proses penyeleksian yang jelas. Walaupun tidak ada perbedaan khusus dalam proses rekrutmen antara laki-laki dengan perempuan, tapi proses tersebut sudah mempunyai suatu standar dan peraturan, sehingga demokrasi sudah terlaksana pada proses rekrutmen PKS.

**e. Kemudahan para kandidat PKS yang telah diseleksi kedalam jabatan publik.**

Partai keadilan Sejahtera memberikan kemudahan bagi calon legislatifnya untuk dapat kembali hadir dalam seleksi selanjutnya. Hal ini dikarenakan adanya kinerja yang nyata oleh calon legislatif tersebut maka partai memberikan suatu bentuk penghargaan kepada para anggotanya.

Para kandidat/calon legislatif Demokrat yang telah diseleksi kedalam jabatan publik, masih mempunyai peluang dalam proses seleksi selanjutnya seperti yang terjadi pada calon legislatif partai Keadilan Sejahtera pada pemilu legislatif Kota Bukittinggi yaitu Ibnu Aziz dan Darwin. Pada tahun 2004 dan 2009, kedua calon legislatif terdaftar sebagai calon legislatif PKS Kota Bukittinggi.

Pada pemilihan umum Kota Bukittinggi tahun 2004, Ibnu Aziz telah menjadi calon legislatif Partai Keadilan Sejahtera, yang

menjadi utusan dari dapil II, sedangkan Darwin menjadi calon legislatif PKS yang menjadi utusan dari dapil I. setelah diadakannya pemilihan umum maka kedua caleg ini berhasil menjadi anggota Legislatif DPRD Kota Bukittinggi pada pemilu tahun 2004. Pada pemilihan umum tahun 2009 kedua calon legislatif di atas kembali terdaftar sebagai calon legislatif partai Keadilan Sejahtera dan berhasil kembali menjadi anggota legislatif DPRD Kota Bukittinggi pada pemilu tahun 2009.

Dari fenomena di atas terlihat jelas bahwa adanya kemudahan yang diberikan oleh partai Demokrat kepada calon legislatifnya untuk dapat tampil kembali dalam ajang pemilihan umum berikutnya.

Dari tahap-tahap rekrutmen PKS diatas dapat diambil kesimpulan bahwa teori miliknya Alan Ware yaitu demokrasi telah berjalan pada PKS. Dalam seleksi calon pemimpin yang dilakukan oleh PKS menggambarkan adanya suatu kejelasan dan adanya demokrasi. Disetiap tahap menjelaskan bahwa dalam penyeleksian ada suatu keterbukaan dan aturan yang jelas.



## **2. Proses Rekrutmen Caleg Perempuan oleh Partai Demokrat pada Pemilu Legislatif Periode 2009-2014 di Kota Bukittinggi**

Untuk menjelaskan bagaimana proses penyalangan calon-calon legislatif pada Demokrat maka peneliti juga akan menggunakan bentuk seleksi calon pemimpin yang dikemukakan oleh Alan Ware. Ada lima cara yang digunakan untuk mendeskripsikan proses rekrutmen pada partai Demokrat yaitu:

### **a. Prosedur dan ketentuan dalam proses penyalangan partai Demokrat.**

Proses penyalangan yang dilakukan oleh partai Demokrat juga dilaksanakan dengan menggunakan suatu signifikasi peraturan. Terdapat beberapa kriteria-kriteria atau peraturan yang harus dijalankan oleh Demokrat dalam proses perekrutan terhadap para calegnya. Sama dengan partai pada umumnya kriteria pertama juga merupakan ketentuan yang berasal dari negara atau disebut juga persyaratan umum dan kriteria kedua berupa kriteria-kriteria khusus yang langsung berasal dari partai Demokrat.

Persyaratan umum yang menjadi pedoman pada semua partai politik yang mengikuti pemilihan umum dan proses penyalangan di kota Bukittinggi termasuk pada partai Demokrat adalah diatur oleh UU pemilu tepatnya UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD Kab/Kota Pasal 50 yang berisikan tentang persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota.

Sedangkan kriteria-kriteria khusus yang menjadi pedoman demokrat adalah langsung berasal dari partai politik itu sendiri. Persyaratan khusus yang menjadi aturan partai Demokrat yaitu mempedomani Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Demokrat :

*“Untuk melaksanakan pemilihan umum kemaren, partai Demokrat dalam proses penyeleksian calon legislatifnya mempedomani dua ketentuan yaitu yang pertama adalah UU yang mengatur tentang Pemilihan Umum yaitu UU No. 10 Tahun 2008 dan yang kedua adalah mempedomani Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai”<sup>58</sup>.*

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa proses penyeleksian yang dilakukan oleh Demokrat berdasarkan kepada dua aturan atau prosedur yaitu prosedur/ketentuan yang berasal dari negara dan juga ketentuan yang berasal dari partai itu sendiri. selain menjalankan aturan dari pemerintah yaitu mematuhi dan menjalankan UU pemilu dalam proses rekrutmen, demokrat juga mempedomani aturan partai (AD/ART) dalam proses rekrutmennya.

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan Caleg Terpilih Demokrat pada pemilu 2009- 2014 / Ketua DPRD kota Bukittinggi yaitu Rachmat Aris pada tanggal 19 mei 2011 di kantor DPRD kota Bukittinggi



#### **b. Batas seleksi dalam proses penyeleksian partai Demokrat**

Untuk melaksanakan proses rekrutmen guna mengikuti pemilihan umum, maka Demokrat telah mensentralisasikan tugas-tugas rekrutmen kepada unit-unit lokal. Unit-unit lokal yang dimaksud adalah unit-unit/ anak- anak partai yang ada di tingkat kelurahan/desa ( Dewan Pengurus Ranting), tingkat kabupaten/kota (Dewan Pengurus Daerah), tingkat provinsi (Dewan Pengurus Wilayah) dan partai ditingkat Pusat. Masing-masing jenjang-jenjang partai ini mempunyai tugas untuk melakukan persiapan untuk pemilihan umum.

Persiapan yang dilakukan oleh partai Demokrat pada pemilu legislatif periode 2009-2014 di Kota Bukittinggi adalah partai Demokrat merancang suatu tahap-tahap untuk menjalankan proses rekrutmen. Agar fungsi rekrutmen tersebut dapat dengan baik dan dapat melahirkan caleg – caleg yang berkualitas guna memenuhi 30% keterwakilan perempuan.

Tahap pertama yang dilakukan oleh partai Demokrat dalam hal persiapan menyangkut calon legislatifnya adalah partai Demokrat membentuk panitia-panitia kecil. Tentang tahapan pembentukan panitia-panitia seleksi ini juga disampaikan oleh salah seorang caleg demokrat pada pemilu legislatif periode 2009-2014 di Kota Bukittinggi yaitu Rachmat Aris, SE yang merupakan caleg perwakilan dari daerah pemilihan Bukitinggi II dan terpilih menjadi aleg dan sekarang menjabat sebagai ketua DPRD Kota Bukittinggi. Beliau menyampaikan bahwa:

*“Tahap pertama dari persiapan partai Demokrat untuk menghadapi pemilihan umum adalah dengan pembentukan panitia- panitia kecil atau kami sebut juga scotting grade, yang berfungsi sebagai agen penyeleksi orang-orang bertalenta untuk dijadikan caleg demokrat”<sup>59</sup>*

Panitia-panitia kecil ini dibentuk oleh partai demokrat untuk menjadi panitia seleksi dalam proses perekrutan, maka persiapan yang dilakukan oleh partai Demokrat dalam proses rekrutmen terhadap calegnya tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan oleh PKS yaitu pembentukan panitia atau tim.

Panitia- panitia kecil ini dibentuk pada setiap jenjang-jenjang partai. Mulai dari tingkat kelurahan/desa ( Dewan Pengurus Ranting), tingkat kabupaten/kota (Dewan Pengurus Daerah), sampai kepada tingkat provinsi (Dewan Pengurus Wilayah). Setiap Dewan Pengurus Wilayah membagi tugas pembentukan panitia tersebut kepada Dewan-Dewan Pengurus Daerahnya, begitu juga dengan Dewan Pegurus Daerah mengutus pembentukan Panitia kepada pengurus cabang dan ranting.

Panitia ini beranggotakan anggota- anggota partai dan pengurus-pengurus partai Demokrat pada setiap kota/kabupaten. Dan kemudian panitia-panitia ini akan bergabung dan membentuk suatu tim penjaringan yang akan merekrut calon-calon legislatif demokrat. Tentang Pembentukan tim penjaringan calon legislatif Demokrat kota Bukittinggi

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan Caleg Terpilih Demokrat pada pemilu 2009- 2014 / Ketua DPRD kota Bukittinggi yaitu Rachmat Aris pada tanggal 19 mei 2011 di kantor DPRD kota Bukittinggi



juga tercantum pada Surat keputusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat kota Bukittinggi pada pemilihan umum tahun 2009 (terlampir).

Tugas tim adalah melaksanakan segala usaha dan kegiatan yang diperlukan untuk menjamin keberhasilan penjaringan Calon Anggota Legislatif DPRD kota Bukittinggi yang memenuhi syarat<sup>60</sup>. Tugas yang dimaksud adalah<sup>61</sup>:

- a. Mengumumkan seluas-luasnya kepada masyarakat tentang penjaringan.
- b. Memberikan penjelasan tentang persyaratan umum dan persyaratan khusus sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Mengumpulkan dan menseleksi administrasi.
- d. Membuat rancangan usulan Daftar Calon Legislatif Kota Bukittinggi sesuai dengan Dapil dengan maksimal kuota 120%
- e. Melaporkan kepada Dewan Pimpinan Cabang dalam Rangka Penetapan Calon.
- f. Menyerahkan Daftar Calon Tetap ke Komisi Pemilihan Umum.
- g. Melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum sampai ditetapkan Daftar Calon Tetap.

---

<sup>60</sup> Pasal 1 Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat kota Bukittinggi pada pemilihan Umum tahun 2009.

<sup>61</sup> Pasal 4 Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat kota Bukittinggi pada pemilihan Umum tahun 2009.

Jumlah Calon Anggota Legislatif yang akan dijamin disesuaikan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku yaitu jumlah Calon Legislatif yang dapat diajukan oleh partai Demokrat adalah sebanyak-banyaknya 120% dari jumlah kursi yang ditetapkan, dengan memperhatikan kuota perempuan minimal 30% pada setiap daerah pemilihan sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.

Secara nasional proses rekrutmen dilakukan serentak oleh partai Demokrat, yaitu pada setiap desa/kelurahan (Dewan Perwakilan Ranting, kota/kabupaten (Dewan Pengurus Cabang), ibu kota/provinsi (Dewan Pengurus Wilayah dan Pusat. Panitia-panitia kecil yang dibentuk untuk penjurangan atau penyeleksian caleg membentuk sebuah tim penjurangan. Tim penjurangan ini mulai dari tingkat kecamatan sampai ke daerah dan seterusnya ketingkat wilayah, secara serentak melakukan proses penyeleksian orang-orang untuk dijadikan bakal calon legislatif Demokrat.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam proses seleksi yang dilakukan oleh Demokrat terjadi dalam satu kekuasaan partai namun proses tersebut disentralisasikan kepada unit-unit lokal. Yaitu dapat terlihat pada proses penjurangan yang dipercayakan dan disebar pada masing-masing kabupaten/kota, kabupaten kota pun mensentralisasikan kepada tim/ panitia penjurangan yang lebih kecil (Tim Penjurangan).



**c. Kekuatan unit pengambil keputusan Partai Demokrat pada proses penyeleksian.**

Setelah proses penyeleksian selesai maka panitia penjangkaran akan mendapatkan nama-nama bakal caleg Demokrat. Nama- nama bakal caleg beserta berkas-berkas yang diperlukan menyangkut pribadi caleg akan dikirim ke DPW dan dari DPW akan diteruskan lagi ke pusat. Dan setelah dirampungkan oleh pusat maka akan dikirim lagi ke bawah melalui DPW dan sampai ke DPD kabupaten, kota dan kecamatan.

Sebelum calon legislatif ikut secara sah dalam pemilu maka berkas- berkas serta nama-nama caleg dikirim dulu ke Komisi Pemilihan Umum untuk diverifikasi. Dan hasil verifikasi yang telah ditetapkan oleh KPU di kembalikan ke partai. Disini masing- masing partai diberikan batasan waktu untuk mengganti caleg yang tidak lolos verifikasi atau melengkapi berkas- berkas yang diperlukan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat terlihat bahwa dalam kekuasaan unit pengambil keputusan yang terjadi pada partai Demokrat tidak dipegang oleh segolongan kecil aktor tetapi menyebar secara luas diantara para anggota dan aktifis didalam unit tersebut. Proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Demokrat disentralisasikan kepada unit- unit lokal. Yaitu dapat terlihat pada proses penjangkaran yang dipercayakan dan disebar pada masing-masing DPC, kabupaten/kota (DPD).

Setiap kabupaten/kota pun mempunyai kekuatan atau hak dalam mengambil keputusan yaitu dengan memutuskan untuk mensentralisasikan kepada tim/ panitia penjangkaran yang lebih kecil ( Tim Penjangkaran) namun pada keputusan akhir yaitu penetapan nama- nama calon dan SK calon tetap berdasarkan keputusan dari partai pusat. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa unit pengambilan keputusan dalam Partai Demokrat terbagi-bagi dan menyebar secara luas diantara para anggota DPC, DPD, DPW dan Pusat.

**d. Urutan posisi bagi kandidat partai Demokrat.**

Tugas yang harus dilakukan partai selanjutnya adalah penetapan nomor urut. Penentuan nomor urut dilakukan berdasarkan ketetapan dari partai. Partai demokrat tidak membedakan nomor urut untuk caleg laki-laki dan caleg perempuan. Maksudnya disini adalah Demokrat memberikan silang-seling antara no urut caleg laki- laki dan caleg perempuan. Hal ini dilakukan karena adanya persamaan gender yang diakui oleh partai Demokrat.

Partai Demokrat memberikan dan menetapkan nomor urut kepada masing – masing caleg berdasarkan kepada loyalitas yang dimiliki caleg untuk partai. Hal ini diperkuat oleh pernyataan caleg Demokrat yaitu:



*“No urut satu menandakan bahwa caleg tersebut nomor satu dalam hal loyalitas untuk partai dan kepengurusan partai”<sup>62</sup>*

Pernyataan ini menerangkan bahwa partai Demokrat memberikan keistimewaan pada anggota internalnya yang berprestasi dalam hal penetapan no urut. Maka pernyataan tersebut sekaligus menggambarkan bahwa partai Demokrat lebih mengutamakan anggota internalnya untuk di usung menjadi caleg. Hal ini diperkuat oleh pernyataan salah satu caleg perempuan demokrat yaitu Hasrida, yang menjelaskan bahwa:

*“ Setiap calon legislatif yang diseleksi oleh kader- kader demokrat harus mempunyai Kartu Anggota Demokrat (KAD)”<sup>63</sup>*

Walaupun partai Demokrat lebih mengutamakan anggota internalnya untuk dijadikan calon legislatif namun Demokrat tetap memberikan penawaran kepada tokoh- tokoh masyarakat yang berpotensi untuk diminta menjadi caleg. Tokoh tokoh masyarakat tersebut haruslah sesuai dengan visi dan cita-cita dari partai Demokrat.

Dari beberapa uraian di atas dapat terlihat bahwa urutan posisi bagi setiap kandidat/calon diseleksi oleh Demokrat pada setiap momen/waktu yang dibutuhkan, seperti halnya urutan posisi untuk calon yang akan maju pada pemilihan umum. Maka urutan posisi akan diputuskan dalam rapat disetiap daerah oleh badan pembuatan keputusan yang relevan yaitu

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan Caleg Terpilih Demokrat periode 2009-2014/ Ketua DPRD kota Bukittinggi yaitu Rachmat Aris pada tanggal 19 mei 2011 di kantor DPRD Kota Bukittinggi

<sup>63</sup> Wawancara dengan Caleg Terpilih Demokrat periode 2009-2014 / Anggota DPRD kota Bukittinggi yaitu Hasrida pada tanggal 19 mei 2011 di kantor DPRD Kota Bukittinggi

anggota- anggota partai yang bertanggungjawab pada daerah atau cabang- cabang partai tersebut.

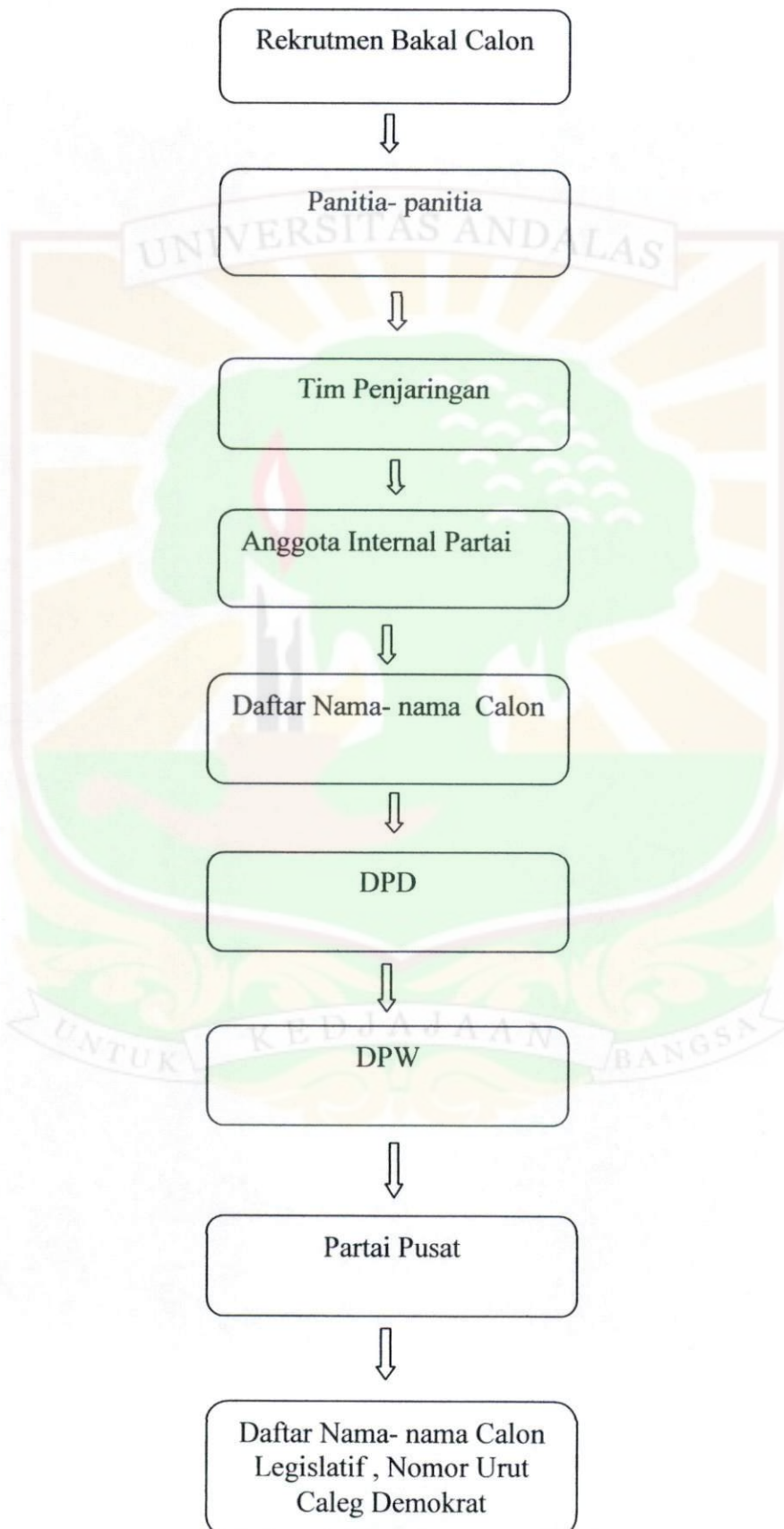
Dari penjelasan di atas juga dapat dilihat bahwa tidak ada perbedaan khusus pada proses rekrutmen antara caleg laki-laki dengan perempuan, dalam mendapatkan calon perempuan atau calon legislatif laki-laki partai Demokrat memiliki aturan yang sama. Perekrutan caleg laki-laki dan perempuan dilakukan dalam cara serta aturan yang sama.

Proses rekrutmen yang dilakukan Partai Demokrat dapat dilihat pada bagan dibawah ini:





**Bagan : Proses Rekrutmen Demokrat**



Berdasarkan bagan di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan proses rekrutmennya Demokrat telah melalui tahap-tahap proses penyeleksian yang jelas. Proses tersebut sudah mempunyai suatu standar dan peraturan, sehingga demokrasi sudah terlaksana pada peroses rekrutmen PKS.

**e. Kemudahan untuk para kandidat Demokrat yang telah diseleksi kedalam jabatan publik.**

Para kandidat/calon legislatif Demokrat yang telah diseleksi ke dalam jabatan publik, masih mempunyai peluang dalam proses seleksi selanjutnya seperti yang terjadi pada calon legislatif partai Demokrat pada pemilu legislatif kota Bukittinggi yaitu Rahmat Aris dan Mardjis. Pada tahun 2004 dan 2009, kedua calon legislatif terdaftar sebagai calon legislatif Demokrat di Kota Bukittinggi. Seperti yang disampaikan oleh Rahmat Aris:

*“Pada pemilihan umum tahun 2004 di Kota Bukittinggi, saya menjadi utusan partai Demokrat pada daerah pemilihan II dan pada pemilu tahun 2009 saya kembali diutus lagi oleh partai pada daerah pemilihan II. Pada dua pemiliha ini saya berhasil menjadi anggota legislatif dan sekarang saya menjabat segai ketua DPRD Kota Bukittinggi<sup>64</sup>”.*

Rahmat Aris telah menjadi calon legislatif Demokrat yang menjadi utusan dari dapil II, sedangkan Mardjis menjadi calon legislati Demokrat

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan Caleg Terpilih Demokrat pada pemilu 2009- 2014 / Ketua DPRD kota Bukittinggi yaitu Rachmat Aris pada tanggal 19 mei 2011 di kantor DPRD Kota Bukittinggi



yang menjadi utusan dari dapil I. setelah diadakannya pemilihan umum maka kedua caleg ini berhasil menjadi anggota Legislatif DPRD Kota Bukittinggi pada pemilu tahun 2004. Pada pemilihan umum tahun 2009 kedua calon legislatif di atas kembali terdaftar sebagai calon legislatif partai Demokrat dan berhasil kembali menjadi anggota legislatif DPRD Kota Bukittinggi pada pemilu tahun 2009.

Dari fenomena di atas terlihat jelas bahwa adanya kemudahan yang diberikan oleh partai Demokrat kepada calon legislatifnya untuk dapat tampil kembali dalam ajang pemilihan umum berikutnya.

Hasil penelitian dari fakta yang didapat dari lapangan menjelaskan bahwa dalam proses rekrutmen yang dilaksanakan oleh partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera dalam menentukan kader perempuannya pada Pemilu legislative periode 2009-2014, telah menggunakan bentuk seleksi calon yang dikemukakan oleh Alan Ware. PKS dan Demokrat telah menggunakan lima cara dalam prosedur seleksi yang dikemukakan Alan Ware.

Lima cara ini digunakan pada tahap-tahap/proses rekrutmen pada Partai Keadilan Sejahtera dan Demokrat. Sehingga dengan menggunakan kelima poin-poin tersebut dalam proses seleksi pemimpin/calon legislatif, maka proses rekrutmen PKS dan Demokrat pada Pemilu legislative periode 2009-2014 di Kota Bukittinggi mengarahkan seleksi terhadap calon pemimpinnya kepada sistem yang demokrasi.

### **3. Kendala Bagi Caleg Perempuan PKS dan Partai Demokrat pada Pemilu Legislatif Periode 2009-2014 di Kota Bukittinggi**

Pada pemilu legislatif periode 2009-2014 di Kota Bukittinggi masih banyak terdapat kendala-kendala dalam hal penjangkaran atau proses rekrutmen perempuan. Walaupun Undang-Undang Pemilu Nomor 10 Tahun 2008 dinilai akan dapat menjawab tantangan dalam hal peningkatan keterwakilan perempuan agar terlaksananya *affirmative action* dalam penyelenggaraan pemilu 2009, namun ternyata hal ini tidak ditemui di lapangan.

Kendala-kendala yang ditemui oleh para caleg perempuan PKS dan Demokrat pada pemilu legislatif periode 2009-2014 di Kota Bukittinggi adalah:

Pertama, adalah masalah kepercayaan (*trust*) yaitu banyak masyarakat yang meragukan akan kualitas kerja perempuan. Sangat jarang sekali kaum perempuan diberikan kepercayaan untuk dapat memimpin suatu partai politik atau suatu jabatan di eksekutif pemerintahan, walaupun ada, itu terjadi disebabkan karena faktor sejarah atau historis atau faktor yang tidak mementingkan segala kualitas dari perempuan tersebut.

Kehidupan Politik memang berbeda dari kehidupan realita yang lain, seperti kehidupan ekonomi atau sosial. Akan tetapi itu bukan menjadi suatu alasan bahwa kaum perempuan tidak bisa juga turut andil dan



memegang peranan di sana, karena sebenarnya kaum perempuan sudah sangat siap untuk mengemban tugas mulia tersebut, hanya saja kesempatan yang ada belum berpihak kepadanya disebabkan masih terbelenggunya kita akan suatu arus sosial budaya yang memang mengedepankan lelaki. Edukasi atau menambah wawasan adalah salah satu dari pencarian kepercayaan untuk perempuan dapat diterima dalam segala segi, tak terkecuali dalam politik.

Seperti halnya yang terjadi pada pemilu legislatif di kota Bukittinggi periode 2009- 2014, khususnya untuk partai yang tidak mendapatkan satupun keterwakilan perempuan di legislatif yaitu PKS. Kecendrungan caleg perempuan PKS tidak mendapatkan suara adalah karena masyarakat tidak percaya akan kepemimpinan wanita. Terlebih lagi PKS yang membawa kaidah- kaidah islam di dalam partainya.

Hal ini dianggap oleh sebagian masyarakat bahwa caleg perempuan dari PKS pastinya akan tetap berada dibawah tekanan laki-laki atau patuh kepada laki- laki karena sudah sesuai dengan kodratnya sebagai ciri khas perempuan dalam ajaran islam. Sehingga Kecenderungan masyarakat untuk memilih jatuh kepada laki-laki. Hal ini juga disampaikan oleh salah seorang tokoh masyarakat yaitu salah satu ketua LPM di kelurahan kota Bukittinggi yaitu E.Dt.Rajo Malenggang yang menyampaikan bahwa:

*“Perempuan yang menjunjung nilai-nilai islam pasti akan patuh terhadap laki- laki, karena itu sudah merupakan kodratnya. Di dalam islam yang menjadi pemimpin bukanlah perempuan tetapi laki- laki”<sup>65</sup>*

Hal ini memperkuat pernyataan bahwa caleg perempuan dari PKS mengalami kendala dan hambatan dari ideologi yang diusung oleh partainya sendiri. Dan hambatan tersebut juga menyebar kepada masyarakat yang akan memilihnya. Untuk partai demokrat masalah yang dihadapi caleg perempuannya khususnya mengenai masalah kepercayaan adalah seperti yang dikatakan oleh salah seorang caleg demokrat berikut ini:

*“Partai sudah menawarkan kesempatan untuk menjadi caleg kepada perempuan- prempuan di internal partai atau tokoh masyarakat. Karena orang-orang yang bersangkutan dipercaya oleh partai bisa berpotensi mengusung nama partai namun ada yang menerima dan ada pula yang menolak karena tidak percaya diri akan kemampuannya”<sup>66</sup>*

Ternyata masalah tentang peningkatan keterwakilan perempuan tidak hanya karena kesalahan didalam internal partai yang menaunginya tetapi juga karena masalah internal yang dihadapi oleh caleg perempuan itu sendiri. Yaitu ketidak percayaan diri caleg perempuan mampu bersaing dengan laki-laki.

---

<sup>65</sup> Wawancara dengan ketua LPM kelurahan Kubu tanjung kota Bukittinggi yaitu E.Dt.Rajo Malenggang kota pada tanggal 10 mei 2011 di kantor Kelurahan Kubu tanjung.

<sup>66</sup> Wawancara dengan Caleg Terpilih Demokrat periode 2009-2014/ Ketua DPRD kota Bukittinggi yaitu Rachmat Aris pada tanggal 19 mei 2011 di kantor DPRD kota Bukittinggi



Kedua, Persoalan berikutnya adalah kemampuan secara finansial, seperti yang kita ketahui bahwa sangat sedikit perempuan yang mempunyai kemandirian finansial sehingga dengan sendirinya caleg perempuan itu tidak mampu maju ke gelanggang dunia politik praktis seperti untuk maju menjadi pemimpin suatu daerah, yang tentunya memerlukan ongkos politik yang tidak sedikit. Akhirnya, sampai saat ini partisipasi dan peran politik perempuan masih terlihat rendah.

Kendala- kendala yang dihadapi oleh para caleg perempuan ini pada dasarnya sangat susah dipisahkan dari diri perempuan itu sendiri. Pada pemilu legislatif periode 2009-2014 di kota Bukittinggi partai politik telah melaksanakan fungsi rekrutmennya dengan baik namun yang menyebabkan menurunnya keterwakilan perempuan adalah karena kendala-kendala yang ada pada kepercayaan masyarakat dan dari keadaan finansial dari perempuan itu sendiri, maka kendala-kendala tersebut menjadi penyebab menurunnya angka keterwakilan perempuan pada pemilu legislatif 2009-2014 di Kota Bukittinggi.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari penelitian di atas adapun kesimpulannya adalah:

Proses rekrutmen terhadap caleg perempuan yang dilakukan oleh PKS dan Partai Demokrat pada pemilu legislatif untuk periode 2009-2014 di Kota Bukittinggi telah terlaksana dengan baik, dimana terdapat prosedur atau ketentuan dan batas seleksi yang jelas dalam proses pencalonan. Partai politik menggunakan proses yang jelas dalam perekrutan para calon legislatifnya. Yaitu partai Demokrat dan PKS menggunakan lima cara dalam prosedur seleksi yang di kemukakan oleh Alan Ware,

Pertama, bahwa proses penyeleksian PKS dan Demokrat diperintah oleh prosedur yang jelas dari ketentuan negara yaitu Undang-undang dan dari partai politik itu sendiri yaitu AD/ART partai. Kedua batas seleksi yang terjadi didalam partai PKS dan Demokrat disentralisasikan kepada unit-unit partai/jenjang-jenjang partai. Ketiga kekuasaan untuk mengambil keputusan menyebar diantara para anggota di dalam unit partai. Keempat PKS dan Demokrat memberikan urutan posisi kepada calon dengan pembuatan keputusan yang relevan. Dan yang kelima adanya kemudahan bagi calon legislatif PKS dan Demokrat untuk dapat terpilih kembali pada pemilihan umum berikutnya.



Maka kelima cara tersebut mengarahkan seleksi kepemimpinan PKS dan Demokrat kepada sistem yang demokrasi, dimana sistem demokrasi tersebut juga berhubungan dengan sistem pemilihan terbuka. Yaitu setiap poin-poin seleksi Alan Ware yang dipakai dalam proses rekrutmen politik untuk caleg perempuan yang dilakukan oleh PKS dan Demokrat pada pemilu legislatif periode 2009-2014 Kota Bukittinggi menandakan adanya pembagian kekuasaan kepada unit-unit yang lebih kecil atau mensesentralisasikan kekuasaan. Sehingga menjadikan sistem rekrutmen tersebut kepada sistem pemilihan terbuka yaitu adanya pembagian kekuasaan dan peranan negara tidak terlalu besar dalam proses rekrutmen.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka peneliti memiliki beberapa saran, adapun saran tersebut adalah:

Upaya-upaya dapat dilakukan partai politik untuk bisa memenuhi jumlah kandidat perempuan minimal 30 persen dan tercapainya jumlah keterwakilan perempuan yang signifikan di lembaga legislatif, yaitu dengan menggunakan kebijakan-kebijakan dan strategi untuk diterapkan, yakni:

pertama, meningkatkan pemahaman dan kesadaran politik kaum perempuan sehingga semakin bertambah minat mereka untuk terjun ke panggung politik. Dan para caleg perempuan mempunyai kepercayaan diri untuk bersaing dengan caleg laki-laki pada pemilihan umum.

Kedua, meyakinkan partai politik bahwa peran serta perempuan dalam pengambilan kebijakan publik sangat penting sehingga perlu meningkatkan rekrutmen calon perempuan dan selanjutnya menempatkan mereka dalam daftar calon tetap (DCT) partai politik. Dan ketiga, meyakinkan masyarakat termasuk media masa, agar mendukung keterwakilan perempuan pada lembaga legislatif, baik ditingkat pusat ataupun daerah.





## DAFTAR PUSTAKA

- Amal, Ichlasul. 1996. *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana
- Anugerah, Astrid. 2009. *Keterwakilan Perempuan dan Politik*. Jakarta: Pancuran Alam
- Budiarjo, Miriam. 1981. *Partisipasi Dan Partai Politik*. Jakarta: Gramedia
- \_\_\_\_\_. 2005. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- \_\_\_\_\_. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Edisi Revisi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Joko Prihatmoko. 2005. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, Semarang: Pustaka Pelajar.
- Koentjaraningrat. 1985. *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT Gramedia
- Mardalis. 2006. *Metode Penelitian Sebagai Suatu Pendekatan Proposal*. Bandung: Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy, J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Norris, Pippa. *Handbook of Political Party*. London :Oxford University Press
- Prasetyo, Bambang. MJ, Lina. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Syafiie, Inu Kencana. 1992. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT Eresco
- Usaman, Husaini. 1995. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ware, Alan. 1996. *Political Parties And Party System*. Oxford: Oxford University Press

## **Skripsi**

Efif, Rahmaida. 2003. *Keterwakilan Perempuan Di DPRD Provinsi Sumatera Barat studi tentang: Sistem Rekrutmen Politik Kasus PAN, Golkar, PDI-P Sumatera Barat*. Padang: Jurusan Ilmu Politik Fisip Unand.

Susilawati, Yuni. 2009. *Keterwakilan Politik Perempuan Di DPRD Kota Padang Periode 2009-2014 Pasca Pembatalan Penetapan Calon Terpilihnya Berdasarkan Nomor Urut Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008*. Padang: Jurusan Ilmu Politik Fisip Unand.

## **Artikel dan Makalah**

J Kristiadi, 2005. Setuju Partai Lokal, Menolak Partai Lokal, Kompas, 5 Agustus

## **Peraturan Perundang-Undangan**

UU Nomor 10 Tahun 2008 Tentang pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik

## **Situs internet**

<http://www.setneg.go.id> Hari Bela Negara. Diakses tanggal 25 maret 2011

<http://www.pu.go.id> Pemkot Bukittinggi Bertekad Menata Kembali Ruang Kota-nya , diakses pada 26 maret 2011.

[www.kabarindonesia.com](http://www.kabarindonesia.com) Sang Pengentasan Kemiskinan ala Kota Bukittinggi . diakses pada 26 Juni 2010



## DRAFT PEDOMAN WAWANCARA

### Identitas Peneliti

Nama : Silvi Permata sari  
No BP/Semester : 04193043/  
Universitas Asal : Universitas Andalas Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Jurusan Ilmu Politik

Alamat : Tigo Balih Bukittinggi

Tujuan Penelitian : Untuk mencapai gelar kesarjanaan tugas akhir S1 Sarjana Ilmu Politik (S.IP).

Subjek Penelitian : Dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan informan dari pengurus partai politik, caleg perempuan dan juga masyarakat.

Judul Proposal Penelitian : Proses Rekrutmen Kader Perempuan PKS dan Demokrat pada Pemilu Legislatif Periode 2009-2014 kota Bukittinggi.

Tujuan Penelitian : Untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses rekrutmen caleg perempuan oleh partai politik karena adanya kenyataan yang menunjukkan menurunnya keterwakilan perempuan pada pemilu 2009 di Kota Bukittinggi yang sama sekali tidak di dorong oleh pembatalan terhadap salah satu pasal dalam UU Pemilu Nomor 10 yaitu pasal 214, yang seharusnya dapat meningkatkan representasi keterwakilan perempuan dengan dirubahnya sistem nomor urut menjadi suara terbanyak sehingga dapat memberikan dukungan bagi keterwakilan perempuan namun menyebabkan menurunnya jumlah perempuan. Kedua yaitu Dengan kenaikan jumlah penduduk dari tahun ketahun yang diiringi dengan kenaikan jumlah pemilih perempuan yang tidak membawa pengaruh bagi keterwakilan

perempuan. Dan yang ketiga adalah kesamaan jumlah angka untuk calon legislatif yang diusung masing-masing partai rupanya juga tidak dapat menjamin partai tersebut memperoleh hasil yang sama untuk jumlah kursi keterwakilan perempuan. Oleh karena itu maka peneliti berasumsi bahwa untuk mendapatkan kursi untuk perempuan ternyata bukanlah semata-mata bisa didorong oleh tindakan afirmatif yang diakomodasikan pemerintah melalui UU yang mengatur tentang sistem keterwakilan perempuan dalam pemilu guna peningkatan keterwakilan perempuan atau peningkatan jumlah namun pengaruh utama untuk peningkatan keterwakilan perempuan adalah berawal dari dalam partai sendiri. Maka berdasarkan fenomena ini peneliti sangat tertarik untuk melakukan sebuah penelitian tentang bagaimana proses rekrutmen kader perempuan PKS dan Demokrat pada pemilu legislatif 2009-2014 di kota Bukittinggi.

- Lokasi Penelitian : Penelitian ini berlokasi di kota Bukittinggi yaitu pada partai Demokrat dan PKS.
- Teknik Pengumpulan data : Melalui wawancara berdasarkan unit analisis lembaga yaitu partai politik.
- Informan : Pengurus partai politik yang mengetahui tentang rekrutmen politik terhadap caleg perempuan pada pemilu legislatif periode 2009-2014 di kota Bukittinggi.



No.	Pertanyaan Penelitian
1	Bagaimanakah prosedur dan aturan dalam penyeleksian caleg?
2	Bagaimanakah prosedur dan aturan dalam penyeleksian berasal?
3	Bagaimanakah proses seleksi yang dilakukan antara laki-laki dengan perempuan pada pemilihan caleg?
4	Apakah ada perbedaan dalam proses seleksi yang dilakukan antara laki-laki dengan perempuan pada pemilihan caleg?
5	Apa kriteria dari partai politik dalam mencari caleg perempuan?
6	Apa kriteria khusus dari partai politik dalam mencari caleg perempuan?
7	Apakah ada sebuah standar yang diharuskan terhadap ketentuan kriteria tersebut?
8	Apakah pendidikan dan pengalaman organisasi ada didalam penetapan kriteria
9	Bagaimanakah batas seleksi dalam satu partai dilakukan? Apakah terpusat atau di sentralisasikan kepada unit-unit lokal
10	Bagaimanakah Partai politik melakukan penyeleksian dan penetapan no urut bagi setiap kandidat?
11	Para calon yang telah diseleksi ke dalam jabatan publik apakah mereka bisa ditarik kembali atau apakah incumbent masih mempunyai peluang?

## MATRIK WAWANCARA DENGAN INFORMAN

No.	Nama	Jabatan	Tanggal	Isi
1	Ibnu Azis	Wakil Ketua DPD PKS	15 April 2011	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Calon perempuan dan calon laki-laki diambil dari kader-kader terbaik PKS</li> <li>2. Para calon dipilih atau ditunjuk langsung oleh partai</li> <li>3. Rekrutmen laki-laki dan perempuan sama</li> <li>4. Dalam merekrut harus terdapat 30% keterwakilan perempuan</li> <li>5. Ada standar terhadap kriteria dalam pencarian caleg perempuan</li> <li>6. Kedudukan anggota partai berpengaruh dalam pencalonan</li> <li>7. Tim pengambil keputusan berada pada pimpinan atas (DPW)</li> <li>8. Adanya kemampuan calon perempuan dalam mengamalkan nilai-nilai Islam</li> </ol>



2	Muhammad Aris	Sekretaris Partai Demokrat / Ketua DPRD Kota Bukittinggi	20 April 2011	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Calon perempuan dan calon laki-laki diambil dari kader-kader terbaik Demokrat</li> <li>2. Para calon dipilih atau ditunjuk langsung oleh partai</li> <li>3. Rekrutmen laki-laki dan perempuan sama</li> <li>4. Dalam merekrut harus terdapat 30% keterwakilan perempuan</li> <li>5. Ada standar terhadap kriteria dalam pencarian caleg perempuan</li> <li>6. Kedudukan anggota partai berpengaruh dalam pencalonan</li> <li>7. Tim pengambil keputusan berada pada pimpinan atas (DPW)</li> <li>8. Adanya kartu anggota partai</li> </ol>
3	Mustafa	Anggota	17 April 2011	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengambil kader dari anggota internal dan juga dilakukan penawaran kepada masyarakat</li> <li>2. Pengurus lebih diprioritaskan</li> </ol>

				<p>3. Memperhatikan kuota 30% perempuan</p> <p>4. Keputusan diambil oleh pusat</p>
4.	Asrida	Anggota	25 April 2011	<p>1. Tidak hanya dari internal partai tetapi juga ada penawaran kepada masyarakat</p> <p>2. Susah dalam mendapatkan calon perempuan yang dapat diterima oleh masyarakat</p> <p>3. Memperhatikan kuota 30% perempuan</p> <p>4. Harus memiliki kartu anggota partai</p>